

HARMONI DALAM KERAGAMAN

JURNALISME INKLUSIF
UNTUK KEBANGSAAN DAN KESETARAAN



INKLUSI PW FATAYAT NU JAWA BARAT



HARMONI DALAM KERAGAMAN

JURNALISME INKLUSIF UNTUK
KEBANGSAAN DAN KESETARAAN

Judul : **Harmoni Dalam Keragaman Jurnalisme Inklusif Untuk Kebangsaan dan kesetaraan**

Penulis : Paridah Napilah, M.Ag., dkk.

Editor : Dr. Abdul Hakim, M.Pd., M.Ag

Layout : Doni Irawan, A.Md.Kom

Reviewer : Irma Riyani, Ph.D.
Neneng Yanti K Lahpan, Ph.D.
Raja Cahaya Islam, M.Ag

Terbitan : Pertama, 2024

KATA PENGANTAR

Untaian syukur kami panjatkan kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan nikmatnya berupa usia dan kesehatan sehingga penyusunan Buku Bunga Rampai Harmoni dalam Keragaman: Jurnalisme Inklusif untuk Kebangsaan dan Kesetaraan bisa diselesaikan.

Ucapan Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada INFID (Internasional NGO Forum on Indonesian Development) yang telah mendukung penuh penyusunan Buku Bunga Rampai ini. INFID Bersama PW Fatayat NU Jawa Barat menjalankan berbagai kegiatan dalam program Inklusi. Program ini memiliki tujuan untuk meningkatkan kepemimpinan inklusi di antara media massa, BUMN, pemerintah daerah, guru pendidikan Islam di sekolah menengah umum, dan aktivis di organisasi-organisasi Islam dalam mempromosikan kebebasan beragama dan berkeyakinan serta melawan intoleransi dan ekstremisme kekerasan, melalui bidang pendidikan dan social.

PW Fatayat NU Jawa Barat dalam program Inklusi ini telah mengadakan berbagai kegiatan diantaranya adalah mengadakan Diskusi Islam Damai bagi Perempuan Muda Pemuka Agama sebanyak 4 seri, pelatihan Jurnalisme Inklusif untuk Kebangsaan dan Kesetaraan baik luring dan daring. Pelatihan ini merujuk pada Modul Jurnalisme Inklusif yang disusun oleh PW Fatayat NU Jawa Barat. Selanjutnya, sebagai outcome dari pelatihan di atas, telah terbit 20 artikel yang memiliki konten toleran dan inklusif di berbagai platform digital yang ada di Indonesia. 20 artikel ini kemudian kami susun menjadi sebuah buku bunga rampai. Buku ini diharapkan bisa menjadi bahan bacaan dan sumber inspirasi bagi keragaman yang ada di Indonesia untuk menciptakan kondisi perdamaian.

Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan dan informasi yang sangat berguna penyusunan buku Bunga Rampai ini. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada:

Hirni Kifa Hazefa Ketua PW Fatayat NU Jawa Barat
Tim Litbang PW Fatayat NU Jawa Barat
Jakatarub
Kutub.co

Dan untuk semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Buku Bunga Ramai ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak kekurangan dalam materi, dari proses penyusunan, kelengkapan data, maupun kedalaman analisisnya. Selaku penyusun, kami sangat mengharap masukan, kritik, dan saran demi kesempurnaan modul ini.

Akhir kata, semoga upaya yang kita lakukan bermanfaat bagi Indonesia dan tidak ada lagi pemberitaan yang diskriminatif dan intoleran sehingga bisa hidup harmonis dalam keragaman

Bandung, 24 Juli 2024

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji bagi Allah SWT., atas Rahmat dan Karunia-Nya telah memberikan kesempatan berharga bagi seluruh pihak yang mendukung lahirnya “Harmoni Dalam Keragaman Jurnalisme Inklusif Untuk Kebangsaan dan kesetaraan” sebagai wujud konsistensi PW Fatayat NU Jawa Barat dalam melaksanakan visi dakwah yang rahmatan lil'alaamiin dengan berbagai program pendukung diantaranya adalah program inklusi Kerjasama dengan INFID (*International NGO Forum on Indonesian Development*). Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW.

Alhamdulillahirobbil 'alamiin, Saya sangat bersyukur bahwa keselarasan pemikiran (*fikroh*) dan Gerakan (*harokah*) PW Fatayat NU dalam melaksanakan dakwah dalam berbagai bentuk baik secara lisan dengan pengajian tatap muka, dakwah melalui platform digital dan dakwah melalui amaliyah sehingga hadirnya Buku jurnalistk inklusif ini menyempurnakan dakwah melalui kemampuan jurnalistik. Dakwah merupakan kegiatan inti Fatayat NU yang bisa diimplementasikan dalam berbagai bidang baik ekonomi, sosial, lingkungan, kesehatan, pendidikan, politik, hukum, media dan penelitian dalam mengembangkan organisasi sesuai bidang garap Fatayat NU.

Apresiasi yang setinggi-tingginya kepada bidang media, penelitian dan pengembangan PW Fatayat NU Jawa Barat masa Khidmat 2020-2025 yang dengan konsisten melakukan upaya-upaya mewujudkan pemikiran-pemikiran kader Fatayat NU dalam bentuk buku-buku yang bisa dipelajari dan digunakan oleh kader-kader Fatayat NU di seluruh tingkatan baik Fatayat NU Jawa Barat dan siapa pun yang membutuhkan. Keberlangsungan generasi Fatayat Nu yang memiliki mental memahami perbedaan dengan bisa menjalankan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara dengan lebih baik penuh persaudaraan dan kasih sayang terhadap sesama manusia.

Melalui Buku ini diharapkan bisa membangun kesadaran kader Fatayat NU untuk terus berdakwah dengan pesan-pesan damai dan

toleransi beragama dalam karya-karya jurnalistiknya. Fatayat NU sebagai organisasi harus memaksimalkan perannya sebagai madrosatul ula bagi siapa pun yang ingin belajar dan memiliki pengalaman dalam memimpin dan dipimpin dalam kehidupan berorganisasi sehingga bisa dirasakan kemanfaatannya oleh masyarakat umum.

Kami menghaturkan terimakasih sedalam-dalamnya dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas dedikasi yang tak terhingga kepada tim inklusi INFID, PW Fatayat NU Jawa Barat dan para penyusun Buku ini serta semua pihak yang telah mendukung proses dalam menuntaskan Buku ini. Semoga menjadi karya dan prestasi terbaik, warisan kebaikan untuk generasi selanjutnya, menjadi amal sholeh bagi semuanya serta menjadi bentuk terwujudnya Fatayat NU Jawa Barat yang bersatu, mandiri dan berprestasi.

Wallohul Muwwafiq Ilaa Aqwaamithoriiiq

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Bandung, Juli 2024

Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU
Jawa Barat

Hirni Kifa Hazefa, S.Pd., M.I.Kom., CEC

KATA PENGANTAR

Assalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Segala puji dan Syukur senantiasa kami panjatkan ke hadirat Allah SWT., atas Rahmat, Hidayah, Inayah, dan Karunia-Nya dengan telah memberikan nikmat kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat menjalankan tugas, peran, dan tanggung jawab kita di muka bumi ini. Shalawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua menjadi yang terpilih untuk mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. aamiin.

Selaku Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU masa Khidmah 2022-2027, saya merasa bahagia dan memberikan apresiasi atas diterbitkannya buku dengan judul: “Harmoni dalam Keragaman, Jurnalisme Inklusif untuk Kebangsaan dan kesetaraan”. Buku yang merupakan hasil karya para peserta *In-Person Training* jurnalistik inklusif, Buku ini memberikan bukti akan keragaman kapasitas kader Fatayat yang tidak hanya terbatas pada isu dan perspektif keagamaan saja. Buku ini juga mampu menggambarkan bahwa kader Fatayat juga memiliki kapasitas dalam berbagai isu lainnya, termasuk isu mengenai keberagaman dan perspektif inklusi yang dapat diinternalisasikan dalam kehidupan keseharian.

Penerbitan tulisan ini tentu juga sangat penting karena beberapa hal. **Pertama**, buku ini telah menjadi media dan sarana mengasah kemampuan kader Fatayat dalam dunia jurnalistik. **Kedua**, buku ini menjadi sarana dan media dokumentasi mengenai pemikiran dan berbagi kisah dan cerita mengenai pengalaman kader Fatayat NU terkait, **Ketiga**, buku ini menunjukkan bahwa kader Fatayat NU memiliki komitmen dan konsistensi

dalam melaksanakan visi dakwah yang *rahmatan lil'alaamiin*. **Keempat**, buku ini juga dapat menjadi sarana pembelajaran dan inspirasi bagi sesama kader Fatayat NU yang tersebar di seluruh Indonesia dan 18 negara serta generasi penerus masa depan.

Terimakasih kami sampaikan kepada PW Fatayat NU Jawa Barat masa Khidmat 2020-2025 yang dengan konsisten melakukan upaya-upaya meningkatkan kapasitas diri kader Fatayat NU hingga dapat melahirkan karya dan prestasi terbaiknya ini. Terimakasih juga kepada seluruh penulis dan tim inklusi INFID-PW Fatayat NU Jawa Barat atas seluruh upayanya hingga dapat melahirkan buku ini. Semoga buku ini menjadi karya dan prestasi terbaik, dan dicatat sebagai amal jariyah yang pahalanya terus mengalir serta tidak pernah terputus karena telah memberikan manfaat tidak hanya bagi sesama kader Fatayat, tetapi juga bagi seluruh bangsa Indonesia.

Wallaahul Muwaffiq Ilaa Aqwaamith Thoriiq

Wassalaamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakaatuh

Jakarta, Juli 2024

Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat NU
Masa Khidmah 2022-2027

Hj. Margaret Aliyatul Maimunah, S.S., M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	4
DAFTAR ISI.....	10
Aktualisasi Perempuan Ahmadi dalam Menghadapi Diskriminasi	12
Keragaman Agama dalam Bingkai Media.....	15
6 Tips Mendidik Anak agar Toleran dengan yang Berbeda Agama.....	19
Kegiatan Lintas Iman sebagai Potret Toleransi dalam Keberagaman Indonesia di Masa Depan	23
Mengapa Perempuan menjadi korban kekerasan dalam Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan?	26
Menyuarakan Keadilan untuk Perempuan: Refleksi dari Dunia Pendidikan	30
Mengenal lebih dekat apa itu disabilitas	34
Perseteraan, Rekonsiliasi dan Kejenaan Moderasi	37
Bentuk Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	39
Perjalanan Dalam Menyuarakan Perdamaian di Tingkat SLTA se-Bandung Raya	44
In-Person Training “Modul Jurnalistik Inklusif untuk Kesetaraan dan Kebangsaan”	46
Suara Bumi dalam Keberagaman.....	49
Perjalanan Seorang Aktivist Perempuan Syiah dalam Melawan Diskriminasi	52
Bagaimana Resolusi Konflik Berperspektif Gender dalam Kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya?.....	55
Shalat Tarawih Dua Imam: "Ngemong" Perbedaan ala Masjid Agung Surakarta.....	60
Jalan Lain Mendirikan Rumah Ibadah	62
Peran Kader Fatayat NU Jawa Barat dalam Mencegah Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan	67
Orang Kristen Mengingat Saya akan Takdir	71

Hidup Berdampingan Bersama Ahmadiyah Cabang Sukamaju-Garut.....	75
Menjaga Warisan: Penghargaan terhadap Budaya Lokal di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka.....	77
Perspektif Perempuan Penghayat Promblematika Stigma Terhadap Konsep Diri Perempuan	82
Perundingan Sebagai bentuk Kegagalan Pendidikan Karakter di Sekolah	84
Anak di luar nikah? Pengalaman Kekerasan Berbasis Gender Perempuan Minoritas.....	90
Program Pendidikan Gratis Meningkatkan Tingkat Pendidikan dan Toleransi	93
Cilolohan dalam Harmoni: Kebersamaan di tengah Keberagaman.....	96
DAFTAR PUSTAKA	100

Aktualisasi Perempuan Ahmadi dalam Menghadapi Diskriminasi

Penulis: Eva Syarifatul Jamilah



Pada akhir Maret 2024, saya menghadiri pelatihan tatap muka dengan tema “Modul Jurnalistik Inklusif untuk Kesetaraan dan Kebangsaan” di Kota Bandung. Perjalanan dari Ciamis ke Bandung saya tempuh seorang diri dengan menggunakan travel.

Sesampai di lobi hotel tempat pelatihan ini berlangsung, sempat saya bertemu dengan seorang perempuan yang nampak sebagai peserta pelatihan ini. “*Teteh juga ikut pelatihan, ya?*” tanya saya untuk memastikan. Pertanyaan saya tersebut disambut dengan anggukan yakin dari perempuan itu. Kami kemudian memutuskan untuk bersama-sama menuju ke lantai UM, dimana pelatihan akan berlangsung.

Di ruang UM, kami berkenalan dengan peserta lainnya yang sudah lebih dahulu tiba. Interaksi kami berkembang dengan cepat, dan dalam obrolan santai, saya mengetahui bahwa perempuan ini tidak hanya hadir untuk dirinya sendiri. Dia kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Salima dari *Lajnah Imaillah* Kota Bandung. Dengan senyum yang tak pernah pudar, Salima juga bercerita bahwa ia lahir dan dibesarkan di Bandung, anak kedua dari empat bersaudara, dan saat ini masih berkuliah di Universitas Padjajaran.

Diskusi kami semakin mendalam ketika saya menanyakan tentang Ahmadiyah dan *Lajnah Imaillah*. “Saya punya kenalan dosen yang juga bagian dari *Lajnah Imaillah*,” saya katakan, teringat salah satu dosen nyentrik yang selalu saya ingat. Mendengar hal itu Salima merespon hal itu dengan penuh antusias.

Percakapan kami ini semakin mengarah pada diskusi yang cukup mendalam. Saya semakin memahami bahwa di balik senyumnya, Salima menyimpan berbagai cerita tentang tantangan yang dihadapinya sebagai

seorang perempuan Ahmadi. Pengalaman dan perjuangannya mencerminkan kondisi yang dialami oleh banyak anggota komunitas Ahmadiyah di Indonesia, yang sering kali harus menghadapi diskriminasi dan prasangka sosial.

Perjuangan Melawan Diskriminasi

Dalam ceritanya, Salima mengungkapkan bahwa Perempuan Ahmadi sering kali dilabeli berbeda bahkan dianggap sesat dibandingkan aliran Islam pada umumnya. Label ini tidak hanya mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap komunitas mereka, tetapi juga berdampak pada pengalaman sehari-hari kehidupannya sendiri. Alhasil, perasaan takut dan tidak aman sering kali menghinggapi saat ia harus menunjukkan identitasnya.

Lebih jauh lagi, Salima berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana stereotip dan prasangka terhadap Perempuan Ahmadi sering kali muncul dalam interaksi sosial. Banyak dari mereka yang harus menghadapi pandangan sinis atau bahkan penolakan ketika mereka mencoba untuk berintegrasi dengan masyarakat umum. Diskriminasi ini bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari komentar negatif yang tidak diinginkan hingga tindakan pengucilan yang lebih terstruktur.

Sementara itu, Salima juga menyadari bahwa tantangan ini tidak hanya bersifat sosial tetapi juga mencakup bidang akademik dan administratif. Walaupun ia tidak mengalami kesulitan langsung di lingkungan akademisnya, banyak anggota Perempuan Ahmadi yang terpaksa menghadapi rintangan dalam memperoleh hak yang sama, baik dalam dunia pendidikan maupun dalam administrasi publik. Diskriminasi ini dapat mempengaruhi peluang mereka untuk berkembang dan berkontribusi secara optimal dalam masyarakat.

Namun, di tengah berbagai tantangan ini, Salima dan komunitas Ahmadi lainnya memilih untuk tidak terpuruk oleh stigma dan prasangka. Mereka berusaha untuk menanggapi diskriminasi dengan keteguhan dan tekad, menjadikan setiap tantangan sebagai dorongan untuk memperkuat kontribusi mereka kepada masyarakat. Dengan memfokuskan diri pada pengembangan diri dan memberikan kontribusi positif, mereka berusaha menunjukkan bahwa mereka adalah bagian integral dari masyarakat, bukan entitas terpisah yang patut dikucilkan.

Aktualisasi diri Salima mengikuti motto yang diusung oleh Khalifah ke-3 Jemaat Ahmadi, Hazrat Khalifatul Masih III: *“Love for all, hatred for none.”* Motto ini mencerminkan komitmen Salima dan komunitasnya untuk menyebarluaskan ajaran cinta kepada seluruh makhluk di bumi. Mereka tidak hanya terlibat dalam aktivitas sosial yang membangun, seperti pendirian sekolah dan rumah sakit, tetapi juga secara aktif berpartisipasi dalam kegiatan kemanusiaan seperti donor darah dan mata. Usaha-usaha ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai mereka tetapi juga memberikan dampak nyata yang positif, yang diakui oleh masyarakat luas dan bahkan tercatat dalam rekor MURI.

Dengan semangat ini, Salima menunjukkan bahwa penerimaan diri dan keberhasilan dalam masyarakat bukanlah hal yang mustahil. Meskipun menghadapi tantangan dan ketidakadilan, Salima dan komunitasnya terus berjuang untuk membuktikan bahwa kasih sayang dan pelayanan kepada sesama dapat mengatasi kebencian dan prasangka. Upaya mereka menyoroti pentingnya integrasi, toleransi, dan cinta tanpa syarat dalam membangun masyarakat yang lebih harmonis dan inklusif.

Keragaman Agama dalam Bingkai Media

Penulis: Desy Salma Aeni

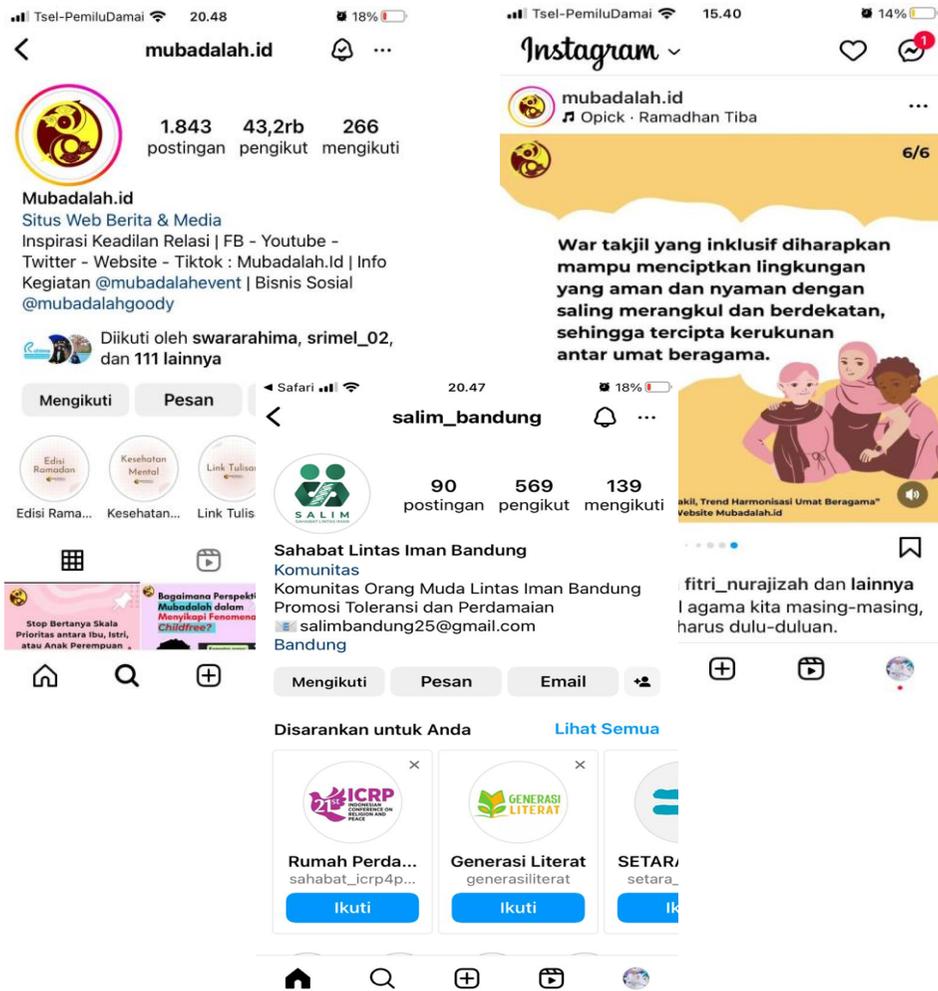


Perkembangan teknologi informasi yang sangat dinamis menjadi alasan tersendiri mengapa diskursus ini selalu relevan. Ditengah sensitivitas isu-isu terkait agama di masyarakat, dunia jurnalisme agama diharapkan mampu memberi solusi pada banyak persoalan kehidupan beragama di masyarakat daripada malah menjadi bagian dari masalah. Termasuk media sosial, khususnya instagram telah menjadi platform yang bukan hanya berfungsi untuk bersosialisasi, melainkan juga pada kondisi sekarang ini sebagai kritik dan saran publik dalam menanggapi suatu fenomena.

Akhir-akhir ini, jagat maya instagram sedang diwarnai dengan suasana yang sarat moderasi beragama, seperti “*war takjil*”, perjumpaan/diskusi lintas iman, aksi kemanusiaan dalam balutan solidaritas, perjuangan perempuan yang bersuara terhadap keberagaman, dan masih banyak lainnya. Tentunya, ini menjadi tolak ukur bahwa masyarakat Indonesia sudah mulai terbuka pandangannya terhadap keberagaman, indahna saling berbagi & menghargai terhadap sesama.

Teman-teman bisa menjumpai konten-konten menarik & sarat makna indahna keberagaman yang seringkali membuat terharu bahwa ajaran Tuhan memang menebarkan kasih sayang terhadap sesama. Diantara akun-akun instagram yang menyajikan indahna toleransi & keragaman yang bisa teman-teman temui, meliputi:

1. **Mubadalah:** Sebagai situs berita dan media yang berkomitmen pada keadilan relasi, Mubadalah berada di bawah naungan Fahmina yang didirikan oleh Buya Husein Muhammad. Akun ini memperkenalkan “*war takjil*”, sebuah trend yang menampilkan harmoni antarumat beragama, memperkuat persatuan, toleransi, dan keharmonisan sosial.



2. **Jakarta (Jaringan Kerja Antar Umat Beragama):** Media ini berfokus pada promosi toleransi dan perdamaian. Salah satu postingannya menyoroti acara "Bukber" di gereja, di mana semua kalangan berkumpul untuk berbagi, berdoa sesuai agama masing-masing, dan berbuka puasa bersama, mencerminkan semangat inklusivitas yang tinggi
3. **Salim Bandung (Sahabat Lintas Iman Bandung):** Komunitas ini terdiri dari orang muda lintas iman yang berdedikasi pada toleransi dan perdamaian. Mereka menyelenggarakan acara konsolidasi untuk memetakan masalah Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KBB) serta Kesetaraan Gender, menunjukkan komitmen mereka terhadap masalah sosial yang kompleks.



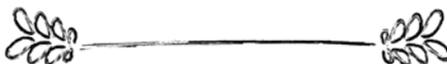
4. **Jaringan Gusdurian:** Gerakan sosial ini menyediakan ruang bagi individu, komunitas, dan organisasi yang terinspirasi oleh pemikiran Gus Dur. Ibu Sinta Nuriyah, istri Gus Dur, secara rutin mengadakan sahur dan buka puasa bersama di berbagai daerah. Acara ini menjadi platform bagi berbagai agama dan kelompok masyarakat untuk bertemu, menghargai, dan merawat kemajemukan sebagai modal berbangsa dan bernegara. Seperti yang dinyatakan Ibu Sinta, “Kemajemukan bangsa kita adalah kenyataan yang harus kita terima, jaga, dan rawat sebagai modal berbangsa dan bernegara. Sahur bersama ini adalah salah satu cara merawat kemajemukan agar kita saling menghargai dan menyayangi dalam bingkai kemanusiaan dan NKRI.”



Dengan terus mengeksplorasi dan mendukung inisiatif-inisiatif positif di media sosial, kita berkontribusi pada penguatan semangat toleransi dan keberagaman dalam masyarakat kita. Media sosial bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga kekuatan untuk mempromosikan harmoni dan pemahaman antar umat beragama. Mari kita terus dukung dan sebarkan pesan-pesan damai ini untuk menciptakan dunia yang lebih inklusif dan harmonis.

6 Tips Mendidik Anak agar Toleran dengan yang Berbeda Agama

Penulis: Amatilah Azizah



Mendidik anak di rumah agar tumbuh menjadi individu yang toleran dan mampu bekerja sama dengan orang lain, termasuk mereka yang berbeda agama, merupakan tanggung jawab penting bagi setiap orang tua. Di tengah meningkatnya keberagaman dalam masyarakat global, pendidikan toleransi sejak dini menjadi esensial. Toleransi tidak hanya melibatkan penghargaan terhadap perbedaan agama, tetapi juga penerimaan perbedaan budaya, etnis, serta latar belakang sosial. Melalui pendidikan yang tepat, anak dapat dibimbing untuk tumbuh menjadi individu yang mampu hidup harmonis dan bekerja sama dengan semua orang, terlepas dari perbedaan keyakinan mereka.

Tips ke-1, memulai dari Keluarga: Contoh dan Diskusi

Pendidikan toleransi dimulai di rumah, dengan orang tua berperan sebagai teladan utama bagi anak. Salah satu cara paling efektif untuk mengajarkan toleransi adalah dengan memberikan contoh yang positif. Anak-anak sangat peka terhadap perilaku orang tua mereka dan cenderung meniru tindakan serta pandangan yang mereka lihat sehari-hari. Ketika orang tua memperlihatkan sikap hormat dan empati terhadap orang lain yang memiliki latar belakang agama atau budaya berbeda, anak-anak akan lebih mudah memahami pentingnya sikap tersebut.

Selain itu, diskusi terbuka tentang perbedaan agama dan budaya juga sangat penting. Orang tua bisa memulai dengan mengajarkan nilai-nilai dasar seperti kasih sayang, keadilan, dan penghormatan terhadap perbedaan. Ketika anak-anak memiliki pertanyaan tentang agama atau kepercayaan orang lain, orang tua perlu memberikan penjelasan yang objektif dan inklusif, menghindari sikap yang merendahkan agama atau keyakinan lain. Hal ini akan membantu anak memahami bahwa perbedaan

adalah hal yang alami dan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memeluk keyakinan yang berbeda.

Tips ke-2, mengajarkan Nilai-Nilai Universal

Penting untuk menanamkan kepada anak-anak bahwa semua agama memiliki nilai-nilai universal yang sama, seperti cinta, kedamaian, dan kebaikan terhadap sesama. Orang tua dapat mengajarkan anak-anak untuk menghargai nilai-nilai ini sebagai fondasi dari hubungan antarmanusia, terlepas dari agama atau keyakinan mereka. Dengan memahami bahwa pada dasarnya semua agama mengajarkan kebaikan, anak-anak akan lebih mudah menerima bahwa perbedaan agama bukanlah hal yang harus ditakuti atau dihindari.

Melalui cerita, buku, atau film yang mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi, anak-anak dapat lebih memahami bahwa mereka hidup di dunia yang penuh keragaman. Cerita-cerita yang menonjolkan kerja sama dan persahabatan di antara individu dari latar belakang agama yang berbeda bisa menjadi alat yang kuat dalam menanamkan sikap toleransi.

Tips ke-3, Mendorong Pengalaman Interaksi dengan Beragam Kelompok

Anak-anak belajar lebih baik melalui pengalaman langsung. Oleh karena itu, penting untuk memberikan anak kesempatan berinteraksi dengan individu dari latar belakang agama yang berbeda. Orang tua dapat mengatur anak untuk bermain dengan teman-teman yang berbeda agama atau berpartisipasi dalam kegiatan yang melibatkan keberagaman, seperti kegiatan sosial, acara kebudayaan, atau perayaan keagamaan.

Misalnya, orang tua bisa mengajak anak menghadiri acara budaya atau festival dari agama lain. Melalui kegiatan seperti ini, anak-anak akan belajar bahwa perbedaan agama tidak menghalangi orang untuk hidup berdampingan dengan damai dan saling menghargai. Interaksi ini juga bisa mendorong mereka untuk melihat persamaan di antara perbedaan yang ada dan bagaimana kerja sama tetap mungkin meskipun ada perbedaan keyakinan.

Tips ke-4, mengajarkan Empati dan Keterbukaan

Salah satu keterampilan penting yang perlu diajarkan kepada anak untuk mendorong toleransi adalah empati, yaitu kemampuan untuk memahami dan merasakan apa yang dirasakan orang lain. Anak-anak yang diajarkan untuk berempati akan lebih mudah menghargai perbedaan dan menghindari prasangka. Orang tua dapat mengajarkan empati dengan cara sederhana, seperti mengajarkan anak untuk mendengarkan orang lain dengan penuh perhatian dan memahami sudut pandang mereka.

Mengajarkan anak untuk terbuka terhadap perspektif yang berbeda juga sangat penting. Orang tua bisa mengajak anak-anak berdiskusi tentang bagaimana setiap individu memiliki latar belakang dan keyakinan yang berbeda, dan penting untuk mendengarkan serta menghormati pandangan mereka, bahkan jika mereka tidak sependapat. Melalui diskusi yang sehat, anak-anak dapat belajar bahwa perbedaan tidak selalu berarti konflik, melainkan peluang untuk belajar satu sama lain.

Tips ke-5, mengatasi Prasangka dan Stereotip

Anak-anak mungkin tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan stereotip dan prasangka tentang kelompok agama tertentu. Untuk mencegah hal ini, orang tua perlu secara aktif mengajarkan anak untuk mengenali dan mengatasi prasangka yang mungkin mereka temui, baik dari lingkungan mereka sendiri maupun dari media. Misalnya, jika anak mendengar atau melihat hal yang bersifat diskriminatif terhadap agama tertentu, orang tua perlu menjelaskan mengapa hal tersebut salah dan bagaimana hal tersebut dapat melukai perasaan orang lain.

Orang tua juga harus menghindari pernyataan atau sikap yang memperkuat stereotip tentang kelompok agama tertentu. Sebaliknya, mereka harus mendorong anak untuk melihat individu berdasarkan kepribadian dan tindakannya, bukan berdasarkan agama atau kepercayaannya. Sikap ini akan membantu anak-anak mengembangkan pandangan yang lebih inklusif dan terbuka.

Tips ke-6 Mendorong Kerja Sama dalam Keberagaman

Untuk mempersiapkan anak agar mampu bekerja sama dengan orang lain yang berbeda agama, orang tua dapat mengajak anak terlibat dalam kegiatan yang mempromosikan kerja sama dalam keberagaman. Misalnya, mereka bisa mengikuti program-program sosial atau kegiatan masyarakat yang melibatkan orang dari berbagai latar belakang agama. Dengan melakukan kegiatan bersama, anak-anak akan belajar bahwa kerja sama bisa berjalan baik tanpa memandang agama atau keyakinan.

Orang tua juga bisa memperkenalkan anak pada tokoh-tokoh yang telah berhasil bekerja sama lintas agama dalam mencapai tujuan bersama. Ini bisa menginspirasi anak untuk melihat bahwa perbedaan agama tidak menjadi penghalang bagi kesuksesan dan harmoni sosial.

Kesimpulan

Mendidik anak di rumah agar toleran dan mampu bekerja sama dengan yang berbeda agama adalah investasi penting dalam membentuk generasi yang lebih inklusif dan penuh penghargaan terhadap keragaman. Melalui teladan, pendidikan tentang nilai-nilai universal, pengalaman langsung, dan diskusi yang terbuka, orang tua dapat membentuk anak menjadi individu yang menghargai perbedaan dan mampu bekerja sama dengan siapa pun, tanpa memandang agama atau keyakinan. Pendidikan toleransi ini akan menjadi fondasi penting bagi masa depan yang lebih harmonis dan damai.

Kegiatan Lintas Iman sebagai Potret Toleransi dalam Keberagaman Indonesia di Masa Depan

Penulis: Fauziah Muslimah



“*Bhineka Tunggal Ika-berbeda-beda teteapi tetap satu jiwa*”, begitulah semboyan nasional bangsa kita yang mencerminkan persatuan dalam keanekaragaman bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya semboyan nasional itu masih belum cukup untuk di realisasikan. Barangkali, tiap masyarakat masih lekat dengan kehidupan yang bersifat homogen atau masih ada perasaan takut dari menjalani hidup yang beraneka ragam.

Fenomena tersebut membuat berbagai elemen masyarakat membuat kegiatan-kegiatan yang melibatkan banyak pihak yang beragam untuk menciptakan lingkungan heterogen yang semakin inklusif dengan perspektif moderasi beragama.

Berbicara tentang moderasi agama di Indonesia, bukan hanya soal interaksi antar umat beragama dengan sikap toleran, tapi juga akomodasi budaya nusantara yang kaya. Aktivitas moderasi beragama tersirat nilai-nilai kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat hadir dalam berbagai lini kehidupan masyarakat Indonesia. Dengannya, kehidupan masyarakat akan semakin meneguhkan semboyan persatuan di tengah keanekaragaman.

Menghidupkan Nilai Moderasi Melalui Pengalaman Pribadi

Terkait nilai moderasi, saya teringat pengalaman berkesan di awal tahun 2023. Saya berkesempatan ikut serta dalam kegiatan #NyadranPerdamaian yang diinisiasi oleh AMAN Indonesia di Desa Temanggung, Jawa Tengah. Dalam rangkaian acara tersebut, saya menginap di rumah umat Buddha selama tiga hari dan mengikuti rangkaian festival dari acara agama hingga seni budaya.

Nyadran atau *Sadranan*, merupakan sebuah tradisi turun-temurun di masyarakat Temanggung, di Dusun Krecek dan Gletuk, dikemas menarik

dengan Nyadran Perdamaian. Anak-anak muda dari berbagai agama, suku, budaya, tradisi, dan generasi bersama-sama mempelajari nilai-nilai Nyadran.

Acara Nyadran Perdamaian memiliki beberapa keunikan, di antaranya pelaksanaan di dua dusun dengan latar belakang keagamaan berbeda namun tetap rukun. Kegiatan yang bertujuan menggali nilai-nilai kebudayaan lokal, kerukunan, perdamaian, gotong royong, dan solidaritas meramaikan acara. Program life in selama empat hari memungkinkan peserta tinggal bersama warga, belajar filosofi sesaji, karawitan, jaran kepagang, meditasi, perempuan bertutur, dan pentas seni topeng ireng.

Pengalaman paling berkesan bagi saya adalah saat program life in, tinggal dan belajar bersama Mba Kurni, seorang perempuan Hindu di Dusun Krecek. Dari pengalaman tersebut, saya bisa mengenal dan berinteraksi intens dengan teman-teman lintas iman.

Tak hanya Nyadran Perdamaian, saya juga berkesempatan mengikuti kegiatan pelatihan jurnalistik inklusif yang melibatkan generasi muda (Gen Z dan Gen Milenial) dari lintas iman yang berlangsung di Bandung pada Rabu-Kamis (20-21/03/2024), inisiasi program dari Fatayat NU dan INFID.

Dalam kegiatan tersebut, saya bertemu beberapa teman muda lintas iman yang sudah aktif dalam berbagai kegiatan inklusif. Tidak hanya dari kalangan umat muslim, peserta Fatayat NU dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang hadir mewakili afiliasi masing-masing, di antaranya Sunda Wiwitan, Ijabi, Penghayat Puan Hayati, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI), Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI), Gereja Kristen Pasundan (GKP), dan lainnya.

Dari berbagai pertemuan tersebut, saya mendapatkan banyak cerita pengalaman dan perspektif inklusif, serta pelatihan menulis untuk menyebarkan nilai-nilai moderasi beragama di media massa dan media sosial. Beberapa teman tersebut bercerita bahwa mereka sudah aktif mengikuti kegiatan dengan teman-teman lintas iman, seperti kegiatan Jabar Welas Asih, Jaringan Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB), Setara, dan lainnya.

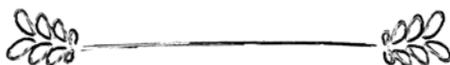
Tak hanya dua kegiatan tersebut, pada akhir tahun 2023 lalu, saya juga berkesempatan mengikuti pelatihan kepemimpinan inklusif bagi pemimpin muda lintas agama yang diselenggarakan oleh Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Dalam kegiatan tersebut, dosen dan mahasiswa program doktor UIII menjadi fasilitator untuk menyebarkan nilai-nilai inklusif lewat kegiatan di masing-masing organisasi kami.

Dalam menyebarkan nilai-nilai inklusif tersebut, berbagai kegiatan yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama lewat program moderasi beragama dan lembaga lain patut kita dukung bersama. Kegiatan dan kampanye sosial yang dilakukan oleh beberapa lembaga seperti AMAN Indonesia, UIII, Fatayat NU, dan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) lewat program pelatihan jurnalistik inklusif menjadi contoh bahwa kerja kolaborasi bisa dan harus dilakukan untuk memberikan ruang-ruang lingkungan inklusif yang lebih luas, tentu dengan program yang berkelanjutan.

Pengalaman-pengalaman berkesan tersebut membuat saya yakin bahwa di Indonesia yang beragam ini, kita bisa tinggal dan berinteraksi dengan damai. Sikap moderasi beragama dan inklusif bisa menjadi pedoman yang pas untuk menjadi jalan tengah bagi masyarakat Indonesia. Kita juga patut berprasangka baik dan bersikap positif pada masa depan keberagaman di Indonesia. Dengan sikap dan perspektif inklusif, kita bisa terus berkarya dan bermanfaat dalam lingkungan yang toleran, damai, serta berbudaya. Semoga.

Mengapa Perempuan menjadi korban kekerasan dalam Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan?

Penulis: Rahma Nurwahidah



Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki keragaman agama dan keyakinan yang luas, termasuk Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu, dan kepercayaan-kepercayaan lokal lainnya. Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan bagi semua warga negara. Namun, dalam praktiknya, ada banyak kasus di mana kebebasan ini dilanggar, terutama terhadap perempuan. Perempuan sering menjadi korban kekerasan dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tulisan ini akan mengeksplorasi mengapa perempuan menjadi target utama dalam pelanggaran ini di Indonesia, dengan menyoroti faktor-faktor seperti peran gender, dinamika sosial-budaya, dan sistem hukum yang diskriminatif.

Peran Gender dalam Masyarakat Patriarki

Di banyak masyarakat, termasuk di Indonesia, perempuan sering dianggap sebagai penjaga moralitas dan tradisi keluarga. Dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama, peran ini sering diperkuat. Ketika perempuan dianggap melanggar norma agama atau sosial, mereka sering kali menjadi target utama untuk dikendalikan atau dihukum. Ini bisa terlihat dalam kasus-kasus di mana perempuan yang memilih untuk berpindah agama atau menikah dengan orang dari agama lain menghadapi tekanan yang lebih besar dibandingkan laki-laki.

Selain itu, dalam masyarakat patriarki, perempuan sering dipandang sebagai simbol kehormatan keluarga. Ketika perempuan dianggap menyimpang dari ajaran agama yang berlaku, ini dilihat sebagai ancaman terhadap kehormatan keluarga atau komunitas. Akibatnya, mereka bisa menjadi sasaran kekerasan, baik fisik maupun psikologis, sebagai cara

untuk 'mengembalikan' mereka ke jalan yang benar atau untuk melindungi reputasi keluarga.

Dinamika Sosial-Budaya yang Mendiskriminasi

Kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama juga dipengaruhi oleh dinamika sosial-budaya yang mendiskriminasi. Di beberapa wilayah Indonesia, ada norma-norma budaya yang kuat yang membatasi peran perempuan dan menekan kebebasan mereka untuk memilih keyakinan mereka sendiri. Misalnya, ada banyak kasus di mana perempuan yang memutuskan untuk meninggalkan agama mayoritas atau memilih aliran agama yang berbeda dihadapkan pada pengucilan sosial, pelecehan, dan bahkan kekerasan fisik.

Contoh lainnya adalah tekanan sosial terhadap perempuan yang bekerja di luar rumah atau terlibat dalam aktivitas yang dianggap "tidak sesuai" dengan peran gender tradisional mereka. Jika aktivitas ini terkait dengan keyakinan agama tertentu, perempuan tersebut sering kali menjadi sasaran kekerasan berbasis agama. Hal ini diperburuk oleh fakta bahwa di banyak komunitas, perempuan dianggap kurang memiliki otonomi untuk membuat keputusan mereka sendiri terkait agama dan keyakinan. Keluarga atau komunitas sering kali berusaha mengendalikan keputusan ini, dan ketika perempuan menolak untuk mematuhi, mereka sering menjadi sasaran kekerasan.

Sistem Hukum yang Kurang Melindungi

Selain faktor-faktor sosial dan budaya, sistem hukum di Indonesia juga berkontribusi terhadap kerentanan perempuan terhadap kekerasan dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama. Meskipun konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, implementasinya sering kali tidak konsisten, dan ada banyak undang-undang dan peraturan yang secara tidak langsung mendiskriminasi perempuan.

Contoh yang paling jelas adalah penerapan hukum syariah di beberapa wilayah seperti Aceh, di mana perempuan sering menjadi target dari kebijakan dan peraturan yang membatasi kebebasan mereka. Misalnya, ada aturan berpakaian yang ketat yang lebih sering diterapkan kepada perempuan dibandingkan laki-laki, serta hukuman fisik bagi mereka yang melanggar aturan-aturan ini. Perempuan yang dianggap melanggar

norma-norma agama ini sering kali dihukum secara publik, yang tidak hanya melanggar hak asasi mereka tetapi juga menimbulkan trauma psikologis yang mendalam.

Selain itu, ketidaksetaraan gender dalam sistem hukum sering kali berarti bahwa perempuan memiliki akses yang lebih terbatas ke keadilan. Dalam banyak kasus, korban kekerasan berbasis agama yang perempuan tidak mendapatkan perlindungan yang memadai atau akses ke penegakan hukum. Hal ini diperburuk oleh adanya pandangan bahwa perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut sering kali "memancing" kekerasan tersebut melalui tindakan mereka, yang mencerminkan bias gender dalam sistem peradilan.

Keterbatasan dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia

Lemahnya perlindungan hak asasi manusia di Indonesia juga berkontribusi pada tingginya angka kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama. Meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional tentang hak asasi manusia, pelaksanaannya di lapangan seringkali tidak efektif. Banyak kasus kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan pelanggaran kebebasan beragama tidak diinvestigasi secara menyeluruh, dan para pelaku seringkali tidak dihukum.

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran tentang hak-hak asasi manusia di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat umum juga menjadi faktor yang memperburuk situasi ini. Ketika perempuan menjadi korban kekerasan berbasis agama, mereka sering kali tidak tahu ke mana harus mencari bantuan atau bagaimana melindungi hak-hak mereka. Selain itu, stigma sosial yang melekat pada korban kekerasan, terutama kekerasan berbasis agama, membuat banyak perempuan enggan melaporkan kekerasan yang mereka alami.

Strategi dan Upaya Mengatasi Masalah

Mengatasi kekerasan terhadap perempuan dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama di Indonesia membutuhkan pendekatan yang holistik dan multidimensi. Pertama, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak perempuan dan kebebasan beragama. Kampanye pendidikan lewat berbagai pelatihan termasuk

pelatihan Jurnalistik Inklusif untuk Kebangsaan dan Kesetaraan yang dilakukan oleh PW Fatayat NU Jawa Barat memegang peranan penting. Kemudian penyadaran publik yang fokus pada pentingnya menghormati kebebasan beragama dan kesetaraan gender dapat membantu mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap perempuan.

Kedua, reformasi hukum diperlukan untuk memastikan bahwa undang-undang yang ada tidak diskriminatif terhadap perempuan dan bahwa mereka dapat melindungi hak-hak perempuan secara efektif. Ini termasuk memastikan bahwa hukum syariah atau hukum adat tidak digunakan untuk membatasi kebebasan beragama atau menjustifikasi kekerasan terhadap perempuan.

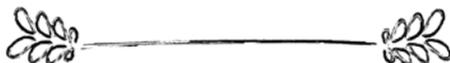
Ketiga, penting untuk memperkuat kapasitas aparat penegak hukum dalam menangani kasus-kasus kekerasan berbasis agama. Ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan peningkatan kesadaran tentang hak asasi manusia dan hak-hak perempuan. Selain itu, perlu ada mekanisme pemantauan yang kuat untuk memastikan bahwa kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan diinvestigasi dan diproses secara adil dan transparan.

Kesimpulan

Perempuan di Indonesia sering menjadi korban kekerasan dalam konteks pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan karena berbagai faktor, termasuk peran gender dalam masyarakat patriarki, dinamika sosial-budaya yang diskriminatif, dan sistem hukum yang kurang melindungi. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya kolaborasi pentahelix dalam hal ini pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, media dan perusahaan untuk memastikan bahwa hak-hak perempuan dan kebebasan beragama dihormati dan dilindungi. Dengan demikian, Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua warganya, tanpa memandang jenis kelamin atau keyakinan agama.

Menyuarakan Keadilan untuk Perempuan: Refleksi dari Dunia Pendidikan

Penulis: Handika Praba Ningrum



Ketua yayasan di sebuah sekolah berbasis pesantren pernah berkata, "Perempuan itu banyak mudharatnya." Pernyataan ini menimbulkan kesedihan yang mendalam dalam diri saya, seolah menggali rasa keprihatinan pada dunia yang kita huni.

Di sekolah itu juga saya mendapati seorang siswi mengeluh bahwa dia tidak diizinkan untuk bergabung dengan pasukan pengibar bendera (Paskibra) di Kecamatan. Sebenarnya, saya merasa itu adalah langkah pertama baginya menuju impian yang telah lama diidamkannya. Tetapi, dengan keputusan sekolah seperti itu malang sekali nasib seorang siswi ini. Baru saja melangkah, impiannya sudah dipatahkan.

Beberapa waktu kemudian, tepatnya pada bulan Juni-Juli 2024, empat siswa dari sekolah tersebut dua laki-laki dan dua perempuan berhasil lolos seleksi calon Paskibra Kecamatan. Namun, kedua siswi tersebut tidak diizinkan ikut. Alasan yang diberikan cukup mengejutkan dimana "perempuan itu banyak *mudharatnya*."

Saya terhenyak, bertanya-tanya mengapa masih ada orang yang membatasi gerak perempuan. Saya kira orang-orang seperti itu hanya ada di masa sebelum Nabi lahir. Telah berabad-abad lamanya Islam mengajarkan kita tentang keadilan dan kemanusiaan, mengapa kita masih berpura-pura tidak tahu? Apakah kebodohan ini disengaja atau memang sudah mendarah daging?

Padahal lebih dari seratus tahun lalu, Kartini membicarakan hak-hak perempuan. Usahnya jauh dari *mudharat*, malah membawa banyak manfaat. Kini, perempuan Indonesia bisa bersekolah, memimpin, berbisnis, berkolaborasi, berceramah, dan aktif di ranah publik—hal yang dulu tak

terbayangkan. Apakah mereka yang merongrong kebebasan perempuan itu buta terhadap sejarah atau memilih untuk tidak peduli?

Alasan lain yang cukup ironis dimana mereka menilai bahwa kegiatan Paskibra itu “memperlihatkan aurat.” Astaghfirullah, apakah siswa/siswi yang mengibarkan bendera di istana negara itu berdosa? Bukankah seragam mereka memakai kaos kaki hingga lutut dan sarung tangan? Kurang menutup aurat bagaimana lagi?

Tiap penyelenggaraan kemerdekaan tanggal 17 Agustus, saat bendera merah putih dikibarkan, saya terharu, membayangkan perasaan orang tua mereka. Bukan aurat yang saya pikirkan, melainkan kebanggaan dan harapan yang tergambar di wajah mereka.

Jika tafsir-tafsir patrialkal ini terus diamini, lantas bagaimana dengan Siti Khadijah, istri Nabi, seorang pengusaha sukses pada zamannya? Tidak mungkin beliau berniaga hanya di rumah. Beliau pasti aktif di ruang publik, bertemu banyak orang, dan berbicara tentang perdagangan. Dan lihatlah Cut Nyak Dien, pahlawan perempuan Indonesia yang ikut berperang melawan penjajah. Sungguh, perjuangannya tak mungkin muncul sekedar berdiam diri di dalam rumah. Sudah pasti keberanian beliau itu dibentuk dalam gejolak dunia luar.

Ketidakadilan di sekolah ini pun semakin bertambah. Selain mendapat kecaman atas impiannya tersebut, mereka juga mendapat ancaman dikeluarkan dari sekolah jika bersikeras untuk mengikuti Paskibra. Baru-baru ini, salah satu siswi mengirimkan pesan kepada saya dengan nada kesal dan cemas. Dalam pesan itu ia mengatakan “Bu, kalau aku tetap ingin ikut, mereka mengancam akan mengeluarkan aku dari pesantren dan sekolah.”

Saya menarik napas panjang membaca pesannya tersebut. Jadi untuk apa semua *workshop*, *technical meeting*, dan rapat yang membahas kurikulum merdeka, jika kenyataannya impian para siswi ini sendiri jauh dari kata merdeka?"

Moderasi Islam dan Keadilan Gender

Sebagai kaum terdidik yang mendidik generasi penerus, kita seharusnya lebih bijak dan adil dalam membuat keputusan. Larangan yang tidak masuk akal ini akan berdampak buruk bagi siswa/siswi ke depannya.

Permasalahan ini tidak hanya sekedar peristiwa partikular soal seleksi Paskibra, tapi tentang berpikir kritis, mengambil keputusan, keadilan, dan cara beragama. Watak asli agama adalah moderat, yaitu adil dan berimbang. Umatlah yang membuatnya berlebihan atau sebaliknya.

Islam mengajarkan kita untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan. Semua manusia adalah *khalifah fil ardh* yang mengemban amanah untuk menjadi pemimpin dan mewujudkan kemaslahatan seluas-luasnya di muka bumi. Karenanya, aturan yang membatasi potensi perempuan untuk berpendidikan, berpengalaman, dan berkembang adalah tidak Islami.

Perempuan juga manusia, sama seperti laki-laki, yang mempunyai potensi dan kesempatan yang sama untuk meraih cita-citanya. Jangan sampai pemahaman kita yang tidak moderat dan keegoisan kita sebagai tenaga pendidik menghambat generasi penerus untuk maju. Jangan sampai pemahaman kita yang tidak moderat melahirkan generasi dengan paham fanatisme buta hingga menimbulkan ekstremisme yang dapat memecah belah bangsa.

Paham Islam yang moderat adalah ikhtiar kita untuk mewujudkan Islam yang menjunjung tinggi keadilan dan ramah perempuan. Begitu juga dengan tujuan pendidikan kita yaitu memperluas akses pendidikan bermutu bagi peserta didik yang berkeadilan dan inklusif. Sudah sangat Islami, bukan?

Berkeadilan berarti memberi kesempatan yang sama kepada laki-laki dan perempuan dalam hal akses dan partisipasi. Inklusif berarti melibatkan semua orang dari berbagai kelompok tanpa meninggalkan salah satunya. Ini berarti kita sebagai pendidik harus memberi akses kepada semua siswa untuk berpartisipasi tanpa mendiskriminasi, dan melibatkan semua siswa untuk ikut mewujudkan pendidikan yang berkesetaraan tanpa memandang jenis kelamin, ras, suku, serta keyakinan.

Saya berharap tidak ada lagi tenaga pendidik yang bertindak egois hanya karena merasa berkuasa. Mari kita bijak dalam membuat dan mengambil keputusan. Jika lembaga pendidikan ingin menyelenggarakan sekolah dan pesantren, maka sistem pendidikan dan kurikulumnya harus seimbang, menggabungkan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan.

Pemerintah juga sebaiknya segera memasukkan pelajaran moderasi beragama dan kesetaraan gender ke dalam kurikulum.

Dengan demikian, kita bisa membentuk generasi yang berpikir adil, bijak, dan toleran, sesuai nilai-nilai luhur Pancasila. Seperti kata Pramoedya Ananta Toer, seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam pikiran, apalagi dalam perbuatan.

Mengenal lebih dekat apa itu disabilitas

Penulis: Dinda Sabila



Disabilitas adalah keadaan di mana seseorang mengalami keterbatasan fisik, sensorik, intelektual, atau mental dalam jangka waktu yang lama. Sehingga dengan hal itu mereka penyandang disabilitas mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh ketika berinteraksi dengan lingkungan dan orang lain. Kondisi ini sering kali mengharuskan mereka untuk menghadapi tantangan yang tidak dialami oleh individu lainnya.

Kondisi disabilitas memang cukup beragam. Maka dari itu mari kita telusuri lebih dalam tentang berbagai jenis disabilitas dan bagaimana kita bisa berinteraksi dengan lebih baik dengan teman-teman disabilitas.

Disabilitas Fisik

Disabilitas fisik mencakup berbagai kondisi yang menghambat gerak atau mobilitas seseorang. Penyebabnya beragam, mulai dari penyakit, kecelakaan, hingga kelainan bawaan. Bayangkan seseorang yang kehilangan bagian tubuh seperti tangan atau kaki akibat amputasi. Mereka harus beradaptasi dengan alat bantu seperti kaki palsu atau kursi roda untuk menjalani kehidupan sehari-hari. Lain lagi dengan mereka yang mengalami paraplegi akibat cedera sumsum tulang belakang, yang mengakibatkan penurunan fungsi motorik atau sensorik pada tubuh. Atau anak-anak dengan cerebral palsy, yang menghadapi tantangan dalam gerak dan koordinasi tubuh sejak lahir. Dalam setiap kasus, ada kisah perjuangan dan kekuatan yang luar biasa.

Disabilitas Sensorik

Disabilitas sensorik merujuk pada gangguan pada salah satu fungsi panca indera. Kondisi ini bisa disebabkan oleh faktor genetik, usia, kecelakaan, cedera, atau penyakit serius. Misalnya, individu dengan disabilitas sensorik netra mungkin kehilangan sebagian atau seluruh

penglihatan mereka. Mereka yang mengalami netra total tidak bisa melihat sama sekali, sementara mereka dengan *low vision* masih bisa melihat cahaya, bentuk, atau huruf dan angka secara terbatas.

Sementara itu, mereka yang memiliki disabilitas sensorik pendengaran atau tuli, menghadapi tantangan dalam komunikasi sehari-hari. Beberapa di antaranya tuli total atau sebagian, yang membutuhkan alat bantu dengar atau menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Kita dapat membantu mereka dengan berkomunikasi menggunakan gerak bibir yang jelas atau belajar sedikit bahasa isyarat.

Disabilitas Intelektual

Disabilitas intelektual melibatkan keterbatasan dalam fungsi intelektual dan perilaku adaptif. Individu dengan kondisi ini sering mengalami kesulitan dalam memahami, belajar, dan berinteraksi dengan lingkungan sekitar mereka. Salah satu contoh adalah grahita, di mana kemampuan intelektual seseorang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan kesulitan dalam menjalankan fungsi sehari-hari. Setiap interaksi dengan mereka harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan pengertian.

Disabilitas Mental

Disabilitas mental adalah gangguan yang kompleks dan beragam, melibatkan gangguan fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Kondisi ini secara signifikan mempengaruhi kehidupan sehari-hari seseorang, mengubah cara mereka berpikir, merasakan, dan berinteraksi dengan orang lain. Gangguan ini juga mempengaruhi bagaimana mereka menangani stres dan situasi sehari-hari. Menghadapi mereka dengan lembut dan pengertian adalah kunci untuk membantu mereka merasa diterima dan dihargai.

Menuju Inklusivitas dan Kesetaraan

Menghormati dan memahami kebutuhan teman-teman disabilitas adalah kunci dalam berinteraksi dengan mereka. Perlakuan yang mereka butuhkan mungkin berbeda dengan orang lain, sehingga kita harus peka terhadap cara terbaik untuk berkomunikasi dan membantu. Misalnya, bagi pengguna kursi roda, selalu tanyakan apakah mereka memerlukan bantuan sebelum memberikan pertolongan. Untuk teman-teman dengan disabilitas sensorik tuli, tepuk pundak mereka untuk menarik perhatian dan bicaralah dengan gerak bibir yang jelas.

Bagi mereka yang mengalami disabilitas sensorik netra, sapaalah mereka dengan menyentuh punggung tangan dan perkenalkan diri Anda sebelum menawarkan bantuan. Pegang tangan mereka di siku Anda saat berjalan bersama untuk menghindari terseret. Sementara itu, bagi mereka dengan disabilitas intelektual atau mental, berbicaralah dengan lembut dan hindari ucapan atau tindakan yang bisa menyinggung perasaan mereka.

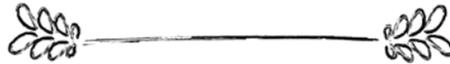
Berbagai alat bantu tersedia untuk membantu mobilitas teman-teman disabilitas. Misalnya, kursi roda, tongkat ketiak, kaki palsu, dan kaki besi untuk mereka dengan disabilitas fisik. Untuk teman-teman dengan disabilitas sensorik penglihatan, tersedia tongkat putih dan kaca pembesar. Alat bantu dengar juga sangat berguna bagi mereka yang memiliki disabilitas pendengaran.

Dengan memahami berbagai jenis disabilitas serta cara berinteraksi yang tepat, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan setara. Pengetahuan ini membantu kita menghargai dan mendukung teman-teman disabilitas, memungkinkan mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sehari-hari.

Mari kita bersama-sama menciptakan masyarakat yang lebih ramah dan terbuka, di mana setiap individu, tanpa terkecuali, memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dan merasa dihargai. Dengan empati dan pengertian, kita bisa membuat dunia ini menjadi tempat yang lebih baik bagi semua orang, termasuk teman-teman disabilitas.

Perseteruan, Rekonsiliasi dan Kejenakaan Moderasi

Penulis: Andi M Ilyas



Beberapa waktu lalu, saya mengikuti pelatihan jurnalistik inklusif yang diadakan oleh PW Fatayat NU bekerja sama dengan INFID di Bandung. Dalam pertemuan itu, salah seorang teman saya berbagi pengalaman tentang moderasi beragama di lingkungan keluarganya. Cerita ini, selain menginspirasi, juga mengundang senyum.

Teman saya ini bernama Handika Praba Ningrum, seorang tenaga pendidik di SMA swasta di Purwakarta, tepatnya di Kecamatan Plered. Selain itu, ia juga aktif sebagai aktivis di Swara Saudari di Purwakarta.

Kondisi keberagaman di lingkungan tempat tinggal Handika memang sedikit kompleks. Banyak pemeluk agama di sana yang memiliki pandangan konservatif. Menurutny, mereka kurang tepat dalam menempatkan fanatisme beragama. Bahkan, banyak dari mereka yang terafiliasi atau setidaknya mendukung organisasi massa yang kini telah dibubarkan oleh pemerintah.

Ayah Handika telah lama mengidolakan seorang pemuka agama, sehingga pemahaman dan doktrin yang disampaikan oleh pemuka agama tersebut telah mendarah daging dan terimplementasi dalam kehidupannya. Terlebih, saat viralnya gerakan 212, ayah Handika semakin fanatik mendukung pemuka agama tersebut dengan segala cara. Hal ini menjadi keresahan bagi Handika, yang saat itu masih duduk di bangku kuliah. Sebagai mahasiswa yang mempelajari filsafat Islam, ia banyak membaca literatur yang inklusif dan moderat.

Suatu hari, Handika pulang dan berdebat dengan ayahnya mengenai agama. Perdebatan itu memanasi hingga Handika keluar rumah karena merasa pendapatnya tidak dihargai. Singkat cerita, Handika menikah dengan seorang pria yang dipujanya, seorang kader Ansor (banom NU),

yang kemudian sedikit banyak mempengaruhi pemahaman mertuanya dalam beragama. Selain itu, konten yang kini dikonsumsi oleh ayahnya juga beraliran inklusif dan moderat.

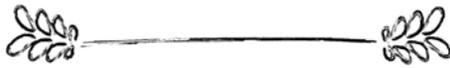
Namun, bagian yang paling mengundang senyum terjadi suatu hari ketika ayahnya sedang keluar. Adik Handika tiba-tiba menangis, dan sebagai kakak yang baik, ia menghampirinya. Ternyata, adiknya sedang bermain dengan gadget ayahnya. Handika pun berkata, "*Ah, aku ganti saja akun yang diikuti bapakku,*"

Setelah itu ia pun langsung mengubah akun-akun yang diikuti oleh ayahnya di berbagai platform. Dengan hal itu ia berharap ayahnya dapat menikmati konten moderat yang dapat merubah paradigma keagamaannya yang tadinya kaku dan keras, menjadi lebih terbuka dan riang gembira. Karena sejatinya, beragama dengan riang gembira adalah wujud syukur dalam berhamba kepada Sang Pencipta.

Kini, lingkungan keluarga yang dahulu membuat Handika sering misuh, kini sering diwarnai dengan gelak tawa bersama ayahnya.

Bentuk Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Penulis: Wulany



Kekerasan berbasis gender (KBG) merupakan fenomena yang melibatkan tindakan kekerasan yang dilandasi oleh norma-norma sosial, budaya, dan keyakinan terkait peran dan identitas gender seseorang. Kekerasan ini sering kali terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, ekonomi, dan simbolik. Dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan, kekerasan berbasis gender dapat memiliki dimensi yang kompleks dan sering kali terjadi akibat adanya persinggungan antara interpretasi agama, tradisi budaya, dan kebijakan negara.

Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang diakui secara universal dan dilindungi oleh berbagai instrumen internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (UDHR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR). Hak ini mencakup kebebasan untuk menganut agama atau keyakinan, kebebasan untuk mengamalkan agama atau keyakinan tersebut baik secara individu maupun kolektif, serta kebebasan untuk berganti agama atau keyakinan. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini sering kali terbentur dengan interpretasi agama atau keyakinan tertentu yang cenderung mendiskriminasi gender tertentu, terutama perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya.

Bentuk-bentuk Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Kebebasan Beragama

Bentuk-bentuk kekerasan berbasis gender dalam konteks kebebasan beragama dapat muncul dalam berbagai wujud, baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa bentuk kekerasan tersebut antara lain:

a. Kekerasan Fisik dan Seksual

Dalam beberapa komunitas agama yang konservatif, perempuan sering kali mengalami kekerasan fisik dan seksual dengan dalih untuk menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Misalnya, dalam beberapa interpretasi agama yang ketat, perempuan yang dianggap melanggar norma-norma agama atau moralitas dapat dihukum dengan kekerasan fisik seperti rajam, cambuk, atau bahkan pembunuhan dengan alasan 'kehormatan'. Tindakan ini sering kali didasarkan pada interpretasi agama yang bias gender dan mengabaikan hak-hak perempuan.

Kekerasan seksual juga dapat terjadi dalam bentuk pemaksaan pernikahan dini yang sering kali dianggap sebagai cara untuk mengendalikan perilaku seksual perempuan dan menjaga kehormatan keluarga atau komunitas. Praktik ini sering kali didasarkan pada interpretasi agama yang salah dan melanggar hak-hak asasi anak perempuan untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan kebebasan pribadi.

b. Kekerasan Psikologis dan Simbolik

Kekerasan psikologis dan simbolik dapat terwujud melalui tekanan sosial dan budaya yang mendiskriminasi perempuan atau kelompok minoritas gender. Contohnya, perempuan yang menolak untuk mematuhi aturan berpakaian yang ditentukan oleh komunitas agama mereka sering kali menghadapi pelecehan verbal, penistaan, atau ostrasisasi. Hal ini tidak hanya merusak kesehatan mental mereka tetapi juga membatasi kebebasan mereka untuk mengekspresikan diri dan menjalani kehidupan mereka sesuai dengan keyakinan dan nilai-nilai mereka sendiri.

Selain itu, simbol-simbol agama dan praktik keagamaan sering kali digunakan untuk melegitimasi hierarki gender dan peran gender yang tradisional. Misalnya, dalam beberapa tradisi keagamaan, perempuan

dilarang untuk menjadi pemimpin spiritual atau mengambil peran yang signifikan dalam upacara keagamaan, yang mencerminkan subordinasi perempuan dan memelihara ketidaksetaraan gender.

c. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi berbasis gender dalam konteks agama dapat terlihat ketika perempuan atau kelompok minoritas gender dilarang untuk bekerja atau berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi tertentu karena alasan-alasan keagamaan. Pembatasan ini sering kali didasarkan pada pandangan bahwa perempuan harus tetap di rumah dan mengurus keluarga, yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi yang besar pada laki-laki dan membatasi kemampuan perempuan untuk mandiri secara finansial.

Faktor-faktor yang Memperparah Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Agama

Beberapa faktor yang memperparah kekerasan berbasis gender dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan antara lain:

a. Interpretasi Agama yang Patriarkal

Banyak bentuk kekerasan berbasis gender dalam konteks agama berakar pada interpretasi agama yang patriarkal yang mengutamakan kekuasaan dan kontrol laki-laki atas perempuan. Interpretasi ini sering kali didasarkan pada pembacaan teks-teks suci yang bias gender dan digunakan untuk melegitimasi perlakuan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok minoritas gender lainnya.

b. Kurangnya Pemahaman dan Pendidikan tentang Hak Asasi Manusia

Kurangnya pemahaman tentang hak asasi manusia dan hak-hak gender di kalangan pemuka agama dan komunitas beragama sering kali menyebabkan perpetuasi praktik-praktik kekerasan yang didasarkan pada tradisi dan norma-norma yang diskriminatif. Pendidikan dan kesadaran tentang hak-hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan kelompok minoritas gender, sangat penting untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dalam konteks agama.

c. Pengaruh Sosial dan Budaya

Norma-norma sosial dan budaya yang mengakar dalam masyarakat juga memainkan peran penting dalam memperparah kekerasan berbasis gender dalam konteks agama. Dalam banyak kasus, norma-norma ini didasarkan pada struktur kekuasaan yang patriarkal dan budaya yang menempatkan perempuan dalam posisi yang lebih rendah daripada laki-laki, yang diperkuat oleh interpretasi agama yang konservatif.

Upaya Mengatasi Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Kebebasan Beragama

Mengatasi kekerasan berbasis gender dalam konteks kebebasan beragama memerlukan pendekatan yang holistik dan inklusif, yang mencakup berbagai strategi, antara lain:

a. Reformasi Hukum dan Kebijakan

Negara-negara harus memastikan bahwa undang-undang dan kebijakan mereka melindungi hak-hak perempuan dan kelompok minoritas gender, termasuk hak untuk bebas dari kekerasan berbasis gender. Hal ini termasuk merevisi undang-undang yang diskriminatif, mengadopsi undang-undang baru yang melindungi hak-hak gender, dan memastikan bahwa sistem peradilan dapat diakses oleh korban kekerasan.

b. Pemberdayaan dan Pendidikan

Pemberdayaan perempuan dan kelompok minoritas gender sangat penting untuk mengatasi kekerasan berbasis gender dalam konteks agama. Pendidikan tentang hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak gender, harus menjadi bagian integral dari kurikulum pendidikan agama dan umum. Selain itu, pelatihan dan program pemberdayaan ekonomi bagi perempuan dapat membantu mereka menjadi lebih mandiri dan mengurangi ketergantungan mereka pada laki-laki.

c. Dialog Antaragama dan Inklusivitas

Dialog antaragama dan inklusivitas adalah kunci untuk mengatasi interpretasi agama yang bias gender. Pemuka agama, akademisi, dan aktivis hak asasi manusia perlu bekerja sama untuk menafsirkan kembali teks-teks agama dengan cara yang lebih inklusif dan adil gender. Upaya ini dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih baik tentang peran dan hak perempuan dan kelompok minoritas gender dalam agama dan masyarakat.

d. Peningkatan Kesadaran dan Advokasi

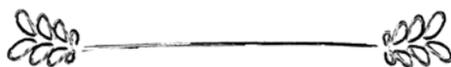
Advokasi dan peningkatan kesadaran tentang kekerasan berbasis gender dalam konteks agama harus terus dilakukan. Kampanye media, lokakarya, dan seminar yang menyoroti pentingnya hak-hak gender dan kebebasan beragama dapat membantu mengubah persepsi dan sikap masyarakat terhadap perempuan dan kelompok minoritas gender.

Kesimpulan

Kekerasan berbasis gender dalam konteks kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan berkelanjutan. Dengan mengatasi akar penyebab kekerasan ini, seperti interpretasi agama yang patriarkal, norma-norma sosial yang diskriminatif, dan kurangnya pemahaman tentang hak-hak gender, kita dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara, di mana kebebasan beragama dan berkeyakinan serta hak-hak perempuan dan kelompok minoritas gender dihormati dan dilindungi.

Perjalanan Dalam Menyuarakan Perdamaian di Tingkat SLTA se-Bandung Raya

Penulis: Paridah Napilah



Tahun 2023 menandai sebuah babak baru dalam perjalanan saya sebagai seorang fasilitator. Kali ini, saya terjun ke dalam dunia kampanye perdamaian, sebuah pengalaman yang baru dan penuh tantangan. Melalui kampanye ini, saya berkesempatan untuk menyebarkan pesan damai di kalangan siswa dan siswi di 40 sekolah tingkat SLTA se-Bandung Raya. Inisiatif ini, yang diorganisir oleh Aliansi Indonesia Damai (AIDA) bersama tim mitra Bandung yang terdiri dari tujuh anggota, merupakan langkah penting dalam upaya membangun kesadaran perdamaian di kalangan generasi muda.

Momen yang paling berkesan adalah ketika pertama kali saya mengikuti pelatihan di kota Depok bersama Ibu Neng Hannah. Saat itu, kami sedang berpuasa dan tiba di Depok pukul 18.30, lalu bertemu dengan tim AIDA pusat. Setelah itu, saya mengikuti rangkaian pelatihan tersebut. Senang sekali rasanya bertemu dengan orang-orang hebat yang memberikan banyak inspirasi.

Pelatihan berlangsung selama 3 hari, dan banyak ilmu yang saya dapatkan, terutama sebagai seorang pemula dalam tim kampanye perdamaian. Awalnya, saya merasa tidak percaya diri dengan tugas yang diberikan karena belum memiliki pengalaman, tetapi dengan motivasi dan keinginan yang kuat saya terus belajar dan memahami tujuan kegiatan ini.

Saya menyadari, bahwa apapun latar belakang kita, kita memiliki tanggung jawab untuk mendukung dan menyampaikan pentingnya menjaga perdamaian di lingkungan kita. Perdamaian adalah fondasi utama untuk menciptakan kehidupan yang aman dan lancar dalam aktivitas sehari-hari.

Dalam konteks Indonesia yang kaya akan keberagaman agama dan budaya, perdamaian menjadi hal yang sangat penting. Di tengah berbagai perbedaan, sering kali muncul konflik yang disebabkan oleh ketidaktahuan

dan prasangka. Melalui kampanye ini, kami berharap dapat memberikan pemahaman baru serta memperkuat komitmen terhadap pentingnya menjaga harmoni dan toleransi di lingkungan sekolah.

Keterlibatan saya dalam kampanye ini tidak lepas dari motivasi pribadi untuk memberikan dampak positif di tengah maraknya masalah seperti bullying dan kekerasan fisik di sekolah. Kegiatan ini melibatkan 80 siswa dan siswi dari setiap sekolah, yang diambil sebagai perwakilan dari setiap kelas. Proses awal kami dimulai dengan Training of Trainers (TOT), sebuah langkah krusial di mana kami harus tampil langsung di lapangan dan menjadi perhatian tim Aliansi Indonesia Damai. Ini adalah titik awal yang menentukan bagi tim perdamaian di Bandung untuk belajar dan mempersiapkan langkah-langkah ke depan.

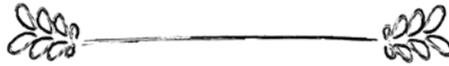
Saat pelaksanaan kampanye perdamaian, respons siswa-siswi sangat antusias. Bahkan, beberapa sekolah meminta tambahan jumlah peserta, meskipun keterbatasan fasilitas membatasi kami hanya pada 80 peserta per sekolah. Kami berharap, para peserta ini akan menjadi agen perdamaian yang menyebarkan pesan positif di lingkungan sekolah dan tempat tinggal mereka.

Tentu saja, setiap kegiatan memiliki tantangannya sendiri. Dalam kampanye ini, tantangan utama terletak pada penjadwalan yang sering berbenturan dengan aktivitas sekolah serta kesulitan dalam menciptakan suasana kondusif. Kami sebagai fasilitator harus bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap sesi berjalan lancar dan informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh peserta. Evaluasi rutin di akhir setiap sesi menjadi salah satu strategi kami untuk terus meningkatkan kualitas kegiatan.

Kegiatan ini bukan hanya memberikan pengetahuan baru kepada generasi muda tentang pentingnya perdamaian dan toleransi, tetapi juga berfungsi sebagai langkah konkret menuju masyarakat yang lebih damai. Pengalaman pertama saya dalam kampanye ini sangat berharga, karena memberikan pemahaman mendalam tentang esensi perdamaian dan bagaimana cara mencapainya. Melalui usaha dan dedikasi kami, semoga Indonesia dapat menjadi negara yang damai dan aman, sesuai dengan harapan dan cita-cita kami.

In-Person Training “Modul Jurnalistik Inklusif untuk Kesetaraan dan Kebangsaan”

Penulis: Parwiin Salma



Bandung, 22 Maret 2024 - di ruang aula Grand Pasundan Convention Hotel, para peserta berkumpul dengan harapan baru. Mereka datang dari berbagai penjuru Jawa Barat, membawa serta semangat dan keresahan akan maraknya ekstremisme kekerasan di media. Di sinilah Fatayat NU Jawa Barat, berkolaborasi dengan INFID (International NGO Forum on Indonesian Development), mengadakan pelatihan bertema “Modul Jurnalistik Inklusif untuk Kesetaraan dan Kebangsaan.”

Suasana hangat menyelimuti ruangan ketika Ibu Neng Hannah, *Project Officer* pelatihan, membuka acara dengan senyum tulusnya. Sebanyak 25 peserta hadir, terdiri dari jurnalis, *influencer*, dan praktisi media sosial, siap menyerap ilmu yang akan mengarahkan mereka pada praktik jurnalisme yang lebih inklusif.

Ibu Neng Hannah menyebutkan, *"Beberapa peserta ini sudah mengikuti pelatihan online, sementara yang lainnya baru pertama kali mengikuti secara offline. Ini menarik karena melibatkan generasi muda yang punya potensi besar untuk menyebarkan nilai toleransi dan kerukunan."*

Di hadapan mereka, tersaji berbagai materi yang dirancang untuk memperkaya keterampilan jurnalistik. Dari "Peran dan Etika Peliputan Jurnalis dalam Moderasi Beragama" hingga "Menangani Konflik Berbasis Agama dalam Berita". Setiap sesi mengalir dengan penuh diskusi dan refleksi. Para peserta diajak untuk merenungkan peran mereka sebagai jurnalis yang tidak hanya melaporkan, tetapi juga membentuk opini publik yang moderat dan inklusif.

Salah satu sesi yang paling menarik adalah ketika berbicara tentang "Jurnalisme Berperspektif Perempuan". Dalam suasana yang penuh empati, para peserta mendengar cerita tentang diskriminasi gender dalam dunia jurnalistik. Materi yang disampaikan pun dijelaskan dengan begitu menggugah. Ini bukan hanya sekedar pelatihan teknik menulis, tetapi tentang memahami penderitaan yang tak terlihat. Menulis adalah sebuah kisah dengan hati yang penuh welas asih.

Di antara para peserta, ada yang datang dari *Lajnah Imaillah*, SEPMI, HWDI, *Ijabi*, Puan Hayati, GKP, Swarasaudari, GKKD, dan WHDI. Keberagaman ini bukan hanya simbolik, tetapi mencerminkan prinsip GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion) yang diusung dalam pelatihan ini. "*Melalui kehadiran yang beragam, kita bisa saling belajar dan memahami lebih dalam makna inklusivitas,*" ujar Ibu Neng dengan penuh keyakinan.

Para narasumber pun tak kalah beragam, dari NU Jabar Online, Bandung Bergerak, Pikiran Rakyat, hingga akademisi dan pendeta Kristen. Mereka semua menyumbangkan perspektif yang berbeda, memperkaya diskusi dan membuka wawasan baru. Rido dari Jakatarub dan Siti Latifah, Pimpinan Redaksi Kutub.id, memberikan pendampingan langsung dalam sesi *one-on-one*, membantu peserta menulis dengan lebih tajam dan mendalam.

Ibu Hirni Kifa Hazefa, Ketua Fatayat NU, menegaskan pentingnya tulisan sebagai jalan dakwah. "*Ini bukan hanya tentang Fatayat, tetapi tentang memberikan kesempatan bagi banyak pihak untuk saling belajar,*" ujarnya. Dalam kalimatnya tersirat harapan bahwa melalui tulisan, nilai-nilai *Rahmatan Lil Alamin* bisa tersebar luas, membawa kedamaian dan keharmonisan.

Di sisi lain, Bapak Hamdan Abdul Wahid dari INFID menyampaikan kekhawatirannya tentang mudahnya akses internet yang sering kali disalahgunakan. "*Informasi yang salah tentang agama bisa menimbulkan stigma negatif,*" katanya. Ia menekankan pentingnya menyampaikan nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan gender, dan kebangsaan secara terus menerus, agar menjadi wacana publik yang sehat.

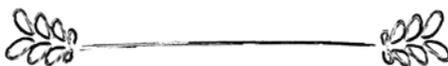
Pelatihan ini bukan sekedar ajang belajar, tetapi sebuah perjalanan menuju pemahaman yang lebih dalam tentang makna jurnalisme yang

bertanggung jawab. Setiap peserta membawa pulang lebih dari sekadar pengetahuan teknis; mereka membawa semangat untuk menulis dengan hati, untuk menyuarakan yang benar dengan penuh kejujuran.

Dalam keheningan malam, ketika para peserta kembali ke kehidupan sehari-hari, mereka kini adalah agen perubahan. Mereka akan menulis cerita-cerita baru yang penuh toleransi dan cinta, meneguhkan bahwa keberagaman adalah kekuatan, dan kesetaraan adalah fondasi bangsa yang harmonis. Pelatihan ini hanyalah awal dari perjalanan panjang, sebuah langkah kecil menuju masyarakat yang lebih adil dan beradab.

Suara Bumi dalam Keberagaman

Penulis: Rosa Adinda Putri



Berapa jam dalam sehari kita menyalakan kipas angin atau AC? Sepanjang hari? Rasanya bumi yang kita tempati saat ini begitu panas, seakan mendidih di bawah langit yang tak lagi bersahabat. Ketika suhu di sekitar kita membuat kita bergantung pada perangkat pendingin untuk merasa nyaman, kita mungkin tidak menyadari bahwa rasa panas ini hanyalah cerminan dari masalah yang jauh lebih besar.

Panas ekstrem yang kita rasakan di tingkat lokal merupakan bagian dari fenomena global yang lebih luas. Kenaikan suhu bumi tidak hanya berdampak pada kenyamanan sehari-hari, tetapi juga mengancam kehidupan di seluruh dunia. Di India dan Meksiko, misalnya, suhu ekstrem telah mengakibatkan korban jiwa. Menurut laporan *climate.gov*, "*Juni 2024 adalah Juni terhangat yang pernah tercatat di dunia dalam catatan NOAA selama 175 tahun.*" Peningkatan suhu ini menggambarkan dampak nyata dari perubahan iklim yang sedang kita hadapi.

Fenomena global ini tidak muncul secara tiba-tiba; ia adalah hasil dari aktivitas manusia yang terus-menerus mengubah keseimbangan atmosfer. Gas rumah kaca yang kita hasilkan—dari penebangan hutan hingga emisi dari kendaraan dan pembakaran bahan bakar fosil—telah menciptakan lapisan yang memerangkap panas dan memperburuk pemanasan global. PBB Indonesia mencatat, "*1% orang terkaya di dunia menyumbang lebih banyak emisi gas rumah kaca dibandingkan dengan 50% orang termiskin.*" Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan sosial dan lingkungan saling terkait dalam krisis yang kita hadapi saat ini.

Seruan Agama untuk Bumi

Perubahan iklim kini menjadi panggilan darurat. Muncul narasi-narasi, gerakan-gerakan, dan tokoh-tokoh yang menyuarakan krisis ini. Dari pemerintahan hingga akademisi, dari organisasi nirlaba hingga pelaku bisnis, semua berusaha mencari solusi. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

mengeluarkan Fatwa Nomor 86 tahun 2023, yang mengharamkan segala bentuk kerusakan alam, deforestasi, dan pembakaran hutan.

Seruan untuk menjaga lingkungan tak hanya bergema dalam Islam, tetapi juga dalam agama-agama lain. Bumi dilihat sebagai makrokosmos, dengan manusia, hewan, dan tumbuhan sebagai mikrokosmos yang saling melengkapi. Filosofi Timur meyakini, “Batu adalah tulang. Air adalah darah. Tanah adalah daging. Hutan adalah urat nadi. Bumi adalah tubuh manusia.”

Yusuf Al-Qaradhawi menekankan pentingnya kesadaran manusia akan posisinya di alam. Kesadaran itu melahirkan moralitas untuk berbuat baik, bukan hanya kepada sesama, tetapi juga kepada alam. Dalam tasawuf, alam adalah ayat-ayat Allah, dan manusia wajib menjaga karunia ini dengan baik. “Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik” (QS Al-A’raf: 85). Dalam Islam, tidak berbuat kerusakan adalah kewajiban seorang khalifah, penjaga bumi, seperti diingatkan dalam Al-Baqarah ayat 30.

Agama Buddha juga menekankan pentingnya menjaga alam. Vanaropa Sutta menyatakan, “Menjaga hutan, taman, atau perkebunan, membangun jembatan, tempat minum, dan sumur, dan mereka yang memberikan tempat tinggal. Jasa mereka selalu tumbuh siang dan malam.” Buddha sendiri menunjukkan rasa terima kasihnya pada pohon Bodhi yang menaunginya pasca pencerahan.

Dalam Katolik, Paus mengeluarkan Ensiklik LAUDATO SI’ tentang perawatan rumah kita bersama. Paus menekankan hubungan yang sehat dengan dunia ciptaan sebagai bagian dari pertobatan manusia yang utuh. Para uskup Australia juga berbicara tentang pentingnya pertobatan ini untuk mencapai rekonsiliasi dengan dunia ciptaan.

Namun, minimnya edukasi tentang sudut pandang agama dalam persoalan lingkungan membuat masalah ini jarang tersorot. Banyak yang berpikir bahwa permasalahan lingkungan tidak memiliki korelasi dengan agama. Padahal, perubahan iklim disebabkan oleh gaya hidup manusia yang tidak sesuai dengan keseimbangan alam dan spiritualitas. Jika setiap pemeluk agama menjalankan perintah untuk tidak merusak, kita akan menjadi pemelihara yang baik.

Fakta ini menyakitkan, mengetahui bahwa bumi kita tidak baik-baik saja. Namun, kita tidak bisa hanya terdiam menyaksikan bumi menderita. Setiap orang bertanggung jawab pada dirinya, masyarakat, dan alam. Perubahan iklim menjadi pengingat bahwa kita lalai menjaga alam. Upaya kita saat ini adalah memupuk spiritualitas guna menjadi hamba yang utuh, yang memiliki hubungan baik dengan Tuhan dan alam sebagai ciptaan-Nya.

Perjalanan Seorang Aktivist Perempuan Syiah dalam Melawan Diskriminasi

Penulis: Ai Sulastris



Latifah, seorang wanita berusia 26 tahun, menjalani hidup dengan keyakinan yang teguh pada ajaran Syiah. Di kota Bandung yang mayoritas penduduknya beragama Sunni, Latifah tetap setia pada keyakinannya, seperti seorang pelaut yang tetap berpegang pada arah kompasnya di tengah badai. Sebagai mahasiswa magister di sebuah kampus ternama, ia terlibat dalam berbagai kegiatan sosial dan keagamaan, menyuarakan perjuangan tanpa henti.

Sebagai aktivis perempuan Syiah, Latifah telah menjadi simbol perlawanan terhadap diskriminasi. Melalui organisasi Ijabi Muda, ia telah membangkitkan kesadaran akan hak-hak dasar manusia yang sering kali dilupakan.

Lahir dan dibesarkan dalam keluarga Syiah yang penuh semangat, Latifah telah menghadapi berbagai bentuk diskriminasi, bahkan dari paman dan saudara-saudaranya. Namun, ia tidak pernah memilih menjadi korban yang pasif. Ia memilih peran aktif dalam memperjuangkan kesetaraan dan keadilan, tidak hanya untuk dirinya sendiri dan keluarganya, tetapi juga untuk komunitasnya.

Dengan latar belakang pendidikan yang kuat dalam ilmu agama dan pendidikan, Latifah sering terlibat dalam diskusi keagamaan. Dedikasinya membuatnya dihormati oleh banyak orang, baik di dalam maupun di luar komunitas Syiah. Ia adalah sosok yang teguh berpegang pada keyakinannya sambil mendorong dialog dan toleransi antarumat beragama.

Pendekatan Moderasi dalam Beragama

Latifah menunjukkan bagaimana seseorang dapat memelihara keyakinan agama sambil mendorong dialog dan toleransi. Dalam

perjalanan hidupnya, ia mengadopsi pendekatan moderasi beragama yang mencakup beberapa aspek kunci.

Pertama, hal ini bisa dilihat bagaimana Latifah sangat **Menghormati Keyakinan Orang Lain**. Dalam kehidupan sehari-hari, ia selalu berusaha untuk menghormati keyakinan dan praktik keagamaan orang lain, meskipun berbeda dari keyakinannya sendiri. Ia meyakini bahwa menghargai perbedaan adalah langkah awal menuju toleransi dan kerukunan beragama. Dalam konteks Indonesia yang plural, sikap ini penting untuk menjaga keharmonisan dan keamanan dalam masyarakat.

Latifah juga aktif dalam **Dialog Antaragama**, sebuah metode penting untuk mengurangi kesalahpahaman dan meningkatkan saling pengertian. Ia sering terlibat dalam diskusi yang mempromosikan dialog terbuka dan tanpa prasangka. Melalui kegiatan ini, seperti yang dilakukan oleh PW Fatayat NU Jabar dan INFID, Latifah berkontribusi pada upaya untuk memperjuangkan hak-haknya dan memahami perspektif orang lain.

Ketika menyangkut soal **Pendidikan tentang Keberagaman**, Latifah berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini. Ia percaya bahwa pendidikan yang menekankan keberagaman membantu membentuk generasi yang lebih menghargai perbedaan. Dengan mempelajari keberagaman dan berbagi pengetahuan ini dengan peserta lain, Latifah menunjukkan sikap saling menghargai yang sangat penting dalam masyarakat plural.

Latifah juga terlibat dalam **Kolaborasi dalam Kegiatan Sosial**, yang merupakan metode efektif untuk membangun kebersamaan dan mengurangi konflik antaragama. Melalui keterlibatannya dalam berbagai kegiatan sosial, ia berupaya menjalin hubungan harmonis antara berbagai kelompok agama. Aktivitas sosial ini memperkuat moderasi beragama dengan membangun rasa saling pengertian dan kebersamaan.

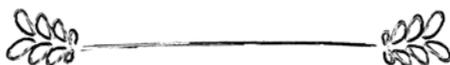
Dalam **Menghindari Provokasi dan Konflik**, Latifah memilih untuk tidak melawan mereka yang memojokkan keyakinannya. Ia lebih fokus pada hal-hal yang menyatukan dan memperkuat hubungan baik antar keluarga dengan keyakinan berbeda. Pendekatan ini menghindari tindakan atau ucapan yang bisa memicu konflik dan lebih menekankan pada upaya untuk menciptakan dialog yang harmonis.

Terakhir, Latifah menekankan pentingnya **Memperkuat Identitas Kebangsaan** di atas identitas keagamaan. Ia percaya bahwa mengutamakan identitas kebangsaan akan membantu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, memastikan bahwa semua orang dapat hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan.

Melalui berbagai pendekatan ini, Latifah tidak hanya memperjuangkan hak-haknya sendiri tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap upaya moderasi beragama di Indonesia. Pengalamannya mengajarkan kita bahwa perbedaan agama bukanlah penghalang, melainkan kekayaan yang memperkaya kehidupan bersama.

Bagaimana Resolusi Konflik Berperspektif Gender dalam Kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya?

Penulis: Sopi



Konflik keagamaan di Indonesia telah menjadi isu yang cukup kompleks, terutama yang melibatkan kelompok minoritas agama. Salah satu konflik yang mencuat adalah konflik Ahmadiyah di berbagai wilayah, termasuk Tasikmalaya, Jawa Barat. Ahmadiyah, sebagai kelompok minoritas, kerap menghadapi kekerasan dan diskriminasi yang sangat signifikan, baik secara sosial, politik, maupun agama. Dalam konteks ini, perspektif gender dalam penyelesaian konflik menjadi sangat relevan, mengingat perempuan sering kali mengalami dampak kekerasan yang lebih kompleks, baik secara fisik maupun sosial. Tulisan ini akan membahas pentingnya resolusi konflik keagamaan berbasis gender, dengan fokus pada kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya.

Latar Belakang Konflik Ahmadiyah di Tasikmalaya

Ahmadiyah adalah sebuah sekte dalam Islam yang dianggap menyimpang oleh sebagian besar Muslim di Indonesia. Kontroversi utamanya berpusat pada keyakinan Ahmadiyah mengenai kenabian setelah Nabi Muhammad, yang ditentang keras oleh kelompok Muslim mainstream. Ahmadiyah telah lama menjadi target diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi, termasuk di Tasikmalaya, yang merupakan salah satu wilayah dengan basis Muslim konservatif yang kuat.

Di Tasikmalaya, serangkaian serangan terhadap komunitas Ahmadiyah telah terjadi dalam beberapa dekade terakhir. Kekerasan tersebut mencakup perusakan rumah ibadah, pengusiran, dan kekerasan fisik terhadap anggota komunitas Ahmadiyah. Pemerintah lokal sering kali lambat dalam merespons atau bahkan tidak memberikan perlindungan yang memadai kepada kelompok ini, menyebabkan Ahmadiyah hidup dalam ketakutan dan ketidakpastian. Ketika konflik keagamaan seperti ini

terjadi, perempuan sering kali menjadi korban yang paling terdampak, baik sebagai bagian dari komunitas minoritas yang teraniaya maupun sebagai kelompok yang rentan secara sosial dan ekonomi.

Perspektif Gender dalam Konflik Keagamaan

Dalam konteks resolusi konflik, penting untuk memahami bahwa dampak kekerasan agama terhadap perempuan sering kali lebih kompleks. Di satu sisi, mereka mungkin terpapar kekerasan fisik yang sama seperti laki-laki, namun di sisi lain, mereka juga menghadapi berbagai bentuk kekerasan gender yang lebih halus, seperti kehilangan akses ekonomi, marginalisasi sosial, dan beban tanggung jawab keluarga yang semakin berat. Dalam kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya, perempuan dari komunitas ini mengalami trauma ganda: sebagai perempuan dan sebagai anggota komunitas yang terdiskriminasi.

Pendekatan resolusi konflik berbasis gender harus mempertimbangkan peran khusus perempuan dalam masyarakat yang sering kali diabaikan dalam narasi besar konflik. Perempuan Ahmadiyah, misalnya, meskipun sering kali menjadi korban kekerasan dan pengusiran, jarang terlibat dalam proses resolusi konflik. Hal ini disebabkan oleh struktur sosial patriarkal yang mendominasi banyak komunitas di Indonesia, termasuk Tasikmalaya, di mana perempuan cenderung dipandang sebagai pihak yang pasif dalam situasi konflik.

Namun, perempuan sebenarnya memiliki peran kunci dalam proses perdamaian dan rekonsiliasi. Dalam beberapa kasus, perempuan dapat menjadi agen perubahan yang efektif, karena mereka lebih mungkin untuk terlibat dalam dialog informal, mediasi keluarga, dan usaha-usaha yang berbasis komunitas untuk mengurangi ketegangan. Perempuan Ahmadiyah, misalnya, dapat memainkan peran penting dalam membangun kembali hubungan sosial dengan komunitas mayoritas Muslim di Tasikmalaya.

Dampak Kekerasan terhadap Perempuan Ahmadiyah

Dampak konflik keagamaan terhadap perempuan Ahmadiyah di Tasikmalaya sangatlah nyata. Mereka tidak hanya menjadi korban langsung dari kekerasan fisik dan psikologis, tetapi juga harus menghadapi marginalisasi tambahan karena status gender mereka. Setelah pengusiran

atau merusak properti, perempuan sering kali dihadapkan pada situasi di mana mereka kehilangan sumber daya ekonomi, terutama jika mereka adalah kepala keluarga tunggal atau tulang punggung ekonomi keluarga.

Selain itu, perempuan Ahmadiyah juga mengalami kekerasan berbasis gender yang sering kali tidak terlihat. Ketika akses mereka terhadap pendidikan, pekerjaan, dan layanan kesehatan terhambat oleh diskriminasi agama, mereka menjadi lebih rentan terhadap kemiskinan dan ketidakberdayaan. Dalam konteks seperti ini, resolusi konflik yang tidak mempertimbangkan aspek gender hanya akan memperpanjang siklus ketidakadilan yang dialami oleh perempuan.

Peran Perempuan dalam Resolusi Konflik

Meskipun perempuan Ahmadiyah sering kali dipandang sebagai korban dalam konflik, mereka juga memiliki potensi besar untuk berperan sebagai agen perdamaian. Dalam banyak masyarakat, perempuan memiliki pengaruh yang signifikan dalam menjaga dan memperkuat jaringan sosial di tingkat komunitas. Mereka juga sering terlibat dalam kegiatan-kegiatan informal yang dapat menjadi dasar bagi upaya-upaya resolusi konflik di tingkat lokal.

Salah satu langkah penting dalam resolusi konflik keagamaan yang berbasis gender adalah memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses dialog dan rekonsiliasi. Pemerintah, organisasi masyarakat sipil, dan tokoh agama perlu bekerja sama untuk menciptakan forum-forum di mana suara perempuan dapat didengar, terutama dalam konteks komunitas yang rentan terhadap kekerasan agama. Di Tasikmalaya, ini dapat dilakukan melalui program-program pelatihan bagi perempuan Ahmadiyah dan perempuan dari komunitas mayoritas untuk terlibat dalam dialog lintas agama dan mediasi.

Selain itu, perempuan dapat memainkan peran penting dalam membangun pemahaman lintas komunitas tentang pentingnya toleransi beragama. Perempuan sering kali lebih dekat dengan isu-isu keseharian yang menyatukan komunitas, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan anak-anak. Oleh karena itu, mereka berada pada posisi yang unik untuk mengadvokasi pentingnya perdamaian dan stabilitas di tingkat lokal.

Kebijakan dan Strategi Resolusi Konflik Berbasis Gender

Untuk memastikan bahwa resolusi konflik di Tasikmalaya memperhatikan perspektif gender, diperlukan kebijakan yang lebih inklusif. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa perempuan Ahmadiyah memiliki akses yang setara terhadap perlindungan hukum, layanan publik, dan kesempatan ekonomi. Ini termasuk memastikan bahwa mereka tidak mengalami diskriminasi dalam memperoleh bantuan sosial atau layanan lainnya akibat status keagamaan mereka.

Kedua, program-program resolusi konflik harus memasukkan perempuan sebagai bagian integral dari proses. Partisipasi perempuan tidak hanya akan meningkatkan inklusivitas, tetapi juga akan memastikan bahwa proses perdamaian dan rekonsiliasi lebih berkelanjutan. Ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan perempuan dalam komunitas Ahmadiyah dan masyarakat luas di Tasikmalaya, sehingga mereka dapat menjadi aktor kunci dalam membangun hubungan yang lebih baik antar kelompok agama.

Ketiga, penting bagi pemerintah dan masyarakat sipil untuk mengadvokasi pendidikan tentang kesetaraan gender dan toleransi beragama di sekolah-sekolah dan komunitas. Pendidikan ini harus dirancang untuk mengurangi stereotip negatif tentang kelompok-kelompok minoritas agama dan menumbuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran perempuan dalam perdamaian dan resolusi konflik.

Tantangan Implementasi Resolusi Konflik Berbasis Gender

Meskipun pendekatan resolusi konflik berbasis gender memiliki banyak manfaat, implementasinya di lapangan sering kali menghadapi tantangan yang signifikan. Salah satu tantangan terbesar adalah budaya patriarkal yang masih kuat di banyak bagian Indonesia, termasuk Tasikmalaya. Dalam budaya seperti ini, peran perempuan dalam proses pengambilan keputusan sering kali dibatasi, dan pandangan tradisional tentang gender cenderung menghambat upaya pemberdayaan perempuan dalam proses resolusi konflik.

Selain itu, resistensi dari kelompok mayoritas terhadap upaya dialog lintas agama juga menjadi tantangan tersendiri. Dalam banyak kasus, ada ketakutan bahwa dialog semacam itu akan mengancam status quo atau memberikan legitimasi kepada kelompok-kelompok yang dianggap

menyimpang, seperti Ahmadiyah. Oleh karena itu, upaya resolusi konflik berbasis gender harus disertai dengan kampanye yang lebih luas untuk mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap hak-hak minoritas.

Shalat Tarawih Dua Imam: "Ngemong" Perbedaan ala Masjid Agung Surakarta

Penulis: Iis Masrurroh



Masjid Agung Surakarta, atau dulu dikenal sebagai Masjid Ageng Keraton Hadiningrat, adalah sebuah peninggalan bersejarah di Solo, Jawa Tengah. Masjid tersebut dibangun pada tahun 1749 M oleh Sultan Pakubuwono III. Masjid ini pada masa pra-kemerdekaan merupakan pusat kegiatan keagamaan serta syiar Islam.

Setiap tahun, berbagai upacara adat dan kegiatan keagamaan, seperti *grebeg*, *kebo bule*, *sekaten*, dan maulid Nabi diadakan di masjid ini. Masjid Agung Surakarta juga menjadi tempat pelaksanaan shalat berjamaah dengan kapasitas besar, termasuk shalat Jumat, Shalat Idul Fitri, Shalat Idul Adha, dan Shalat Tarawih.

Salah satu hal unik yang membedakan Masjid Agung Surakarta adalah tradisi pelaksanaan shalat tarawih. Masjid ini menggabungkan tradisi dua komunitas muslim di Indonesia, yaitu Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU), yang memiliki perbedaan dalam jumlah rakaat tarawih. Muhammadiyah melaksanakan 8 rakaat tarawih, sementara NU melaksanakan 20 rakaat tarawih.

Masjid Agung Surakarta mengatasi perbedaan ini dengan memfasilitasi pelaksanaan shalat tarawih dua imam. Pada awalnya, keraton menggelar shalat tarawih 20 rakaat dengan 3 rakaat sunah witr. Namun, seiring berjalannya waktu, jumlah rakaat mengalami pergeseran menjadi 8. Hal ini menimbulkan perdebatan, sehingga sebagai solusi, masjid memfasilitasi pelaksanaan shalat tarawih bagi kedua aliran tersebut.

Tradisi shalat tarawih dua imam ini dimulai sejak tahun 1980-an dan masih berlanjut hingga hari ini. Melansir BBC News Indonesia, Mohammad Muhtarom yang merupakan ketua Takmir Masjid Agung Surakarta, menyampaikan, "praktek shalat tarawih yang menggabungkan dua tradisi

itu dapat dijadikan contoh bagi masyarakat untuk terbiasa melihat perbedaan”.

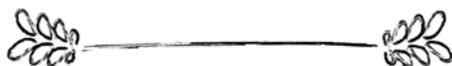
Dalam pelaksanaannya, saat adzan berkumandang, seluruh jamaah berkumpul bersama-sama. Imam pertama memimpin shalat Isya' dan tarawih. Setelah mencapai rakaat ke-8, imam kedua bertugas menyelesaikan shalat sunah witr 3 rakaat bagi jamaah yang mengikuti tradisi Muhammadiyah dengan 11 rakaat tarawih. Bagi jamaah yang melaksanakan tarawih 23 rakaat, mereka menunggu imam pertama untuk melanjutkan shalat tarawihnya. Namun, setelah selesai, semua jamaah kembali berkumpul menjadi satu untuk melakukan tadarus Quran bersama.

Tradisi shalat tarawih dua imam di Masjid Agung Surakarta mencerminkan semangat menghargai perbedaan dan memperkuat toleransi di antara komunitas Muslim Muhammadiyah dan NU. Hal ini sejalan dengan pesan yang diungkapkan oleh mantan Presiden Amerika Serikat, John F. Kennedy, dalam pidatonya di American University pada tahun 1963, "Jika kita tidak bisa mengakhiri perbedaan kita sekarang, setidaknya kita bisa membantu menjadikan dunia aman bagi keberagaman" yang sangat relevan dengan situasi Ramadhan di Masjid Agung Surakarta.

Masjid Agung Surakarta bukan hanya tempat ibadah, tetapi juga menjadi simbol perdamaian, harmoni, dan inklusivitas di tengah masyarakat. Dengan menggelar shalat tarawih dua imam, masjid ini memberikan contoh nyata tentang pentingnya menghargai keberagaman dan menciptakan lingkungan yang inklusif dalam praktik keagamaan. Tradisi ini mengajarkan kita bahwa perbedaan dapat menjadi kekuatan yang mengikat umat Muslim dalam persatuan.

Jalan Lain Mendirikan Rumah Ibadah

Penulis: Yohanes Irmawandi



Di kota tua - demikian makna harfiah “Dayeuhkolot” dalam Bahasa Sunda - tercatat perjuangan panjang dan penuh lika-liku untuk mendirikan rumah ibadah. Gereja Kristen Pasundan (GKP), yang ada di wilayah Desa Citeureup, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, lama bergulat dengan masalah perizinan rumah ibadah dan belum juga menemukan titik terang. Tidak hanya kesulitan dalam perizinan, jemaat ini juga beberapa kali mengalami penyerangan.

Ini adalah cerita tentang keteguhan dan pencarian solusi di tengah tantangan yang tak kunjung usai. Bertahun-tahun berganti pendeta dan kepengurusan, upaya memohonkan izin mendirikan bangunan (IMB) gereja berkali-kali mentok. Terakhir di 2023, pendeta jemaat saat ini, Cliff Edward Kasakeyan, kembali mengajukan permohonan komunikasi perizinan dengan pemerintah setempat.

"Selain berusaha mengikuti mekanisme perizinan, kami juga ingin memastikan bahwa semua prosedur sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadah," ujar Pdt. Cliff.

Peraturan yang dikenal dengan PBM Dua Menteri 2006 ini mengatur tata cara pendirian rumah ibadah dengan melibatkan masyarakat sekitar. Cliff menyampaikan rencana untuk kembali mengumpulkan tanda tangan warga sebagai bagian dari persyaratan masih terganjal, karena respon Pengurus RT/RW masih belum jelas.

Isu ini bukanlah hal baru. Permasalahan mengenai perizinan rumah ibadah di Kabupaten Bandung merupakan hal yang pelik. Data BPS Jawa Barat 2020 mencatat terdapat 180.865 umat Kristen Protestan di Kabupaten Bandung, sementara jumlah gereja hanya 12 unit.

Ketimpangan ini mencerminkan masalah mendalam yang dihadapi komunitas Kristen di Kabupaten Bandung. Sekaligus juga mempertanyakan komitmen pemerintah daerah untuk melindungi, menghormati dan memenuhi kebutuhan warga dalam beribadah.

RSD: Dialog Akar Rumput

Satu dari banyak upaya advokasi yang pernah dilakukan terkait konflik berlatar agama dilakukan Asian Muslim Action Network (AMAN) Indonesia, sebuah organisasi non-pemerintah yang fokus pada isu radikalisme dan terorisme. Lembaga ini memperkenalkan dan melatih metode *Reflective Structured Dialogue (RSD)* pada Desember 2022. Pelatihan ini ditujukan bagi aktivis dari berbagai daerah, termasuk Bandung yang diwakili aktivis JAKATARUB, GKP, IJABI, Fatayat NU Jabar dan WHDI.

Setelah pelatihan, sejak awal 2024 fasilitator RSD Bandung mulai merancang inisiatif dialog, salah satunya terkait konflik GKP Dayeuhkolot. Sebagai tahapan pra-dialog, dilakukan analisis situasi geografis, budaya, kronologi konflik dan pemetaan aktor. Dalam proses pra-dialog, fasilitator melakukan *home visit* dan berdialog dengan para aktor yang sudah dipetakan sebelumnya.

Obertina Johanis, pendeta yang menjadi saksi kunci dalam penyerangan terhadap GKP Dayeuhkolot tahun 2007, mengungkapkan kelembagaan gereja ini sudah ada sejak tahun 1954 dan memiliki gedung ibadah di dalam kompleks militer Kesatuan Batalyon Infanteri (Yonif) Para Raider 330 bersama Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius. Ketika kelembagaan militer Kesatuan Yonif 330 direlokasi ke Cicalengka, gereja-gereja tersebut diminta untuk keluar.

"Awal berdiri tahun 1954, dulunya di dalam asrama tentara. Selama 1954-1995, ada dua gereja di dalam komplek itu. Ketika kesatuan militer pindah, gereja diminta untuk keluar," jelas Obertina.

Setelah diminta keluar dari kompleks militer, Gereja Katolik membeli tanah di sekitar komplek, sedangkan GKP membeli rumah tinggal tak jauh dari kompleks militer lalu direnovasi menjadi gereja. Kedua gereja tersebut terletak agak jauh dari pemukiman warga.

Hubungan dengan masyarakat sekitar awalnya baik, namun masalah muncul pada tahun 2005-2007 ketika organisasi masyarakat yang menyebut diri Aliansi Gerakan Anti Pemurtadan (AGAP) melakukan penyerangan terhadap gereja.

Penyerangan tersebut berdampak besar pada psikologis jemaat GKP Dayeuhkolot. Obertina mengungkapkan, *"Alasan mereka tidak setuju karena mengganggu masyarakat. Sejak 1995, kami urus IMB tidak dikasih sampai saat ini. Banyak yang trauma dan ketakutan. Bahkan ada ibu-ibu yang trauma melihat pakaian cingkrang karena penyerangan."*

Gereja tetap berusaha membangun hubungan baik dengan masyarakat melalui berbagai program sosial. Mereka memiliki perahu yang disimpan di halaman gereja untuk digunakan dalam evakuasi saat banjir dan sering memberikan bantuan sembako kepada masyarakat sekitar.

Namun, D, anggota BPD Desa Citeureup, mengungkapkan bahwa selama menjabat, dirinya belum pernah menerima laporan atau tembusan terkait bantuan kebencanaan dari GKP Dayeuhkolot.

"Komunikasi dan tembusan kepada pemerintah desa sangat diperlukan. Ini penting untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa GKP Dayeuhkolot turut memberikan bantuan kebencanaan," ujarnya.

Perbedaan Persepsi atas PBM Dua Menteri

Hasil dialog RSD menunjukkan adanya perbedaan persepsi mengenai PBM Dua Menteri 2006. Beberapa tokoh agama dan masyarakat berpendapat gereja harus dibangun dari nol, bukan hasil renovasi rumah tinggal.

Dalam satu sesi dialog, seorang pelaku demonstrasi dan penyerangan GKP Dayeuhkolot tahun 2007, S, berbagi pendapatnya mengenai hak beribadah.

"Di NTT, umat Islam juga mendapatkan intimidasi dari umat Kristen saat mendirikan masjid, karena umat Kristen adalah mayoritas di sana." ujarnya.

Tokoh ini menyatakan posisi mayoritas-minoritas agama harus dianggap wajar di Indonesia dan toleransi itu ada jika minoritas tahu diri dan

tahu peraturan, tidak sewenang-wenang. Ia menganggap hal itu juga berlaku dalam mendirikan bangunan ibadah di desa Citeureup.

Sementara itu, O perangkat desa Citeureup menjelaskan bahwa ketentuan perizinan gereja mencakup tanda tangan sebanyak sembilan puluh orang pengguna gereja dan enam puluh tanda tangan dari warga sekitar.

"Tanda tangan 90 orang pengguna gereja harus berasal dari jemaat yang tinggal di sekitar lokasi gereja, bukan dari daerah lain." Begitu Menurut O yang mengaku paham hal tersebut dari kegiatan Sosialisasi PBM Dua Menteri oleh FKUB Kabupaten Bandung.

Ungkapan tersebut mengindikasikan disinformasi terkait implementasi PBM Dua Menteri. Aturan sebenarnya tidak dibatasi oleh zonasi rumah tinggal umat, karena indikasinya adalah pengguna rumah ibadah.

Masyarakat Adalah Pemilik Dialog

Kebuntuan komunikasi antara GKP Dayeuhkolot dan perangkat Desa Citeureup perlahan terurai. Fasilitator RSD Bandung berhasil menginisiasi ruang dialog reflektif dengan aparat desa, tokoh agama dan tokoh masyarakat baik itu kategori kontra, pro dan abu-abu terhadap kasus pendirian rumah ibadah.

Dari mulai proses pra-dialog hingga pasca-dialog, RSD berhasil dilakukan tanpa adanya indikasi kekerasan. Hal ini patut diapresiasi karena itu artinya masyarakat siap menyelesaikan masalah dengan damai. Sejatinya, konflik memang tidak akan pernah terhindarkan. Namun pengelolaan yang tepat, konflik bisa terhindar dari kekerasan. Salah satunya dengan membuat inisiasi dialog yang bermakna.

Dialog tidak selalu harus berorientasi kepada kesepakatan. Bisa saja hanya sekadar upaya saling mendengar dan memahami perspektif orang lain. Dalam konteks konflik GKP Dayeuhkolot, fasilitator mencoba menghadirkan "korban" dan "pelaku" dalam satu forum, tujuannya saling mendengar.

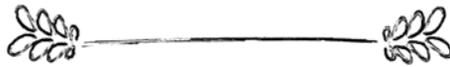
Ruang dialog sudah dibuka, selanjutnya, baik itu GKP Dayeuhkolot atau pemerintah desa, maupun para aktor masyarakat harus mengisi ruang

perjumpaan tersebut agar tidak tertutup kembali sebab merekalah sejatinya pemilik dialog.

Meskipun kepentingan GKP Dayeuhkolot untuk mendapatkan izin masih belum terealisasi, indikasi kebutuhan pengakuan dan dukungan untuk mengatasi rasa terisolasi serta integrasi sosial bagi GKP Dayeuhkolot sudah terbuka. Ini adalah jalan lain yang juga bisa ditempuh pada permasalahan serupa terkait pendirian rumah ibadah.

Peran Kader Fatayat NU Jawa Barat dalam Mencegah Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Penulis: Farhan Mubarak



Jawa Barat merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang kerap menghadapi berbagai persoalan terkait kebebasan beragama dan berkeyakinan. Fenomena intoleransi, diskriminasi, dan kekerasan terhadap kelompok minoritas agama sering kali mencuat di wilayah ini. Dalam menghadapi persoalan tersebut, berbagai organisasi kemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan memperjuangkan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan. Salah satu organisasi yang memiliki kontribusi besar dalam isu ini adalah Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), khususnya di tingkat Jawa Barat. Fatayat NU, sebagai organisasi perempuan di bawah naungan NU, memiliki kader-kader yang aktif dalam memperjuangkan hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, serta mempromosikan nilai-nilai toleransi dan keberagaman.

Fatayat NU: Organisasi Perempuan dengan Misi Sosial

Fatayat NU merupakan salah satu badan otonom dari Nahdlatul Ulama yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan advokasi sosial. Didirikan pada tahun 1950, Fatayat NU berkomitmen untuk membela hak-hak perempuan dan anak, serta memperjuangkan keadilan sosial, termasuk dalam isu-isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Jawa Barat, kader-kader Fatayat NU telah menunjukkan peran yang signifikan dalam upaya menghadapi pelanggaran kebebasan beragama, terutama dalam konteks meningkatnya intoleransi terhadap kelompok-kelompok agama minoritas seperti Ahmadiyah, Syiah, dan kelompok kepercayaan lokal.

Peran Kader Fatayat NU dalam Advokasi Kebebasan Beragama

Kader Fatayat NU Jawa Barat memiliki peran penting dalam advokasi kebebasan beragama dan berkeyakinan, terutama melalui pendekatan yang berbasis komunitas dan dialog. Mereka bekerja di berbagai tingkat, mulai dari desa hingga kota, untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya toleransi dan pluralisme. Peran kader-kader ini tidak hanya terbatas pada perempuan dan anak-anak, tetapi juga melibatkan seluruh masyarakat melalui program-program advokasi yang inklusif.

a. Pendidikan dan Sosialisasi tentang Toleransi Beragama

Salah satu strategi utama yang dilakukan oleh kader Fatayat NU Jawa Barat dalam menghadapi pelanggaran kebebasan beragama adalah melalui pendidikan dan sosialisasi. Mereka sering kali mengadakan diskusi, seminar, dan lokakarya tentang pentingnya toleransi, hak asasi manusia, dan keberagaman agama di Indonesia. Kader Fatayat NU memanfaatkan forum-forum pengajian dan kegiatan keagamaan lainnya sebagai wadah untuk menyebarkan pesan-pesan tentang kebebasan beragama dan bagaimana nilai-nilai Islam yang inklusif dapat menjadi landasan untuk mencegah diskriminasi.

Dalam konteks ini, kader Fatayat NU tidak hanya berperan sebagai pendidik, tetapi juga sebagai fasilitator dialog antaragama. Mereka memfasilitasi pertemuan antara kelompok-kelompok agama yang berbeda untuk menciptakan ruang dialog yang konstruktif, sehingga konflik dan kesalahpahaman yang mungkin muncul dapat diatasi secara damai.

b. Advokasi Kebijakan Publik

Selain berperan di tingkat masyarakat, kader Fatayat NU juga terlibat dalam advokasi kebijakan publik. Mereka secara aktif berinteraksi dengan pemerintah daerah dan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak diskriminatif dan menghormati kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di Jawa Barat, beberapa kebijakan lokal yang membatasi kebebasan beragama, seperti larangan ibadah bagi kelompok Ahmadiyah dan Syiah, telah menjadi perhatian kader Fatayat NU. Mereka bekerja sama dengan organisasi-organisasi hak asasi manusia lainnya

untuk menekan pemerintah agar mencabut kebijakan-kebijakan yang bersifat diskriminatif dan merugikan kelompok minoritas.

c. Pemberdayaan Perempuan dalam Isu Kebebasan Beragama

Kader Fatayat NU juga menaruh perhatian khusus pada peran perempuan dalam konflik-konflik agama. Dalam banyak kasus, perempuan menjadi korban utama dari diskriminasi dan kekerasan yang muncul akibat pelanggaran kebebasan beragama. Kader Fatayat NU di Jawa Barat bekerja untuk memberdayakan perempuan agar dapat berperan aktif dalam menyuarkan hak-hak mereka dan melindungi komunitas mereka dari diskriminasi. Pemberdayaan ini dilakukan melalui pelatihan keterampilan, advokasi hukum, dan penyediaan akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan bagi perempuan yang terkena dampak konflik.

Perempuan sering kali memiliki peran yang unik dalam menyelesaikan konflik, terutama karena mereka memiliki akses yang lebih baik untuk membangun dialog dalam lingkungan keluarga dan komunitas. Kader Fatayat NU memanfaatkan potensi ini untuk menciptakan agen-agen perdamaian yang dapat mendorong perubahan sosial dari bawah.

d. Kolaborasi dengan Organisasi Lain

Kader Fatayat NU di Jawa Barat juga bekerja sama dengan berbagai organisasi masyarakat sipil, baik lokal maupun nasional, dalam upaya mereka untuk memperjuangkan kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kolaborasi ini penting untuk memperkuat suara mereka dan memastikan bahwa upaya advokasi yang dilakukan dapat mencapai hasil yang lebih signifikan. Misalnya, dalam menangani kasus pelanggaran kebebasan beragama terhadap komunitas Ahmadiyah dan Syiah, kader Fatayat NU sering bekerja sama dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Lembaga Bantuan Hukum (LBH), dan kelompok-kelompok lintas agama.

Tantangan dan Harapan

Meskipun peran kader Fatayat NU dalam menghadapi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat cukup signifikan, mereka juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah resistensi dari kelompok-kelompok konservatif yang sering kali menolak upaya dialog dan cenderung memaksakan pandangan agama mereka. Selain itu, kurangnya dukungan dari pemerintah daerah dalam beberapa kasus juga menjadi hambatan yang harus diatasi.

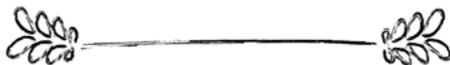
Namun, harapan tetap ada. Dengan semakin banyaknya kader Fatayat NU yang terlibat dalam upaya advokasi kebebasan beragama, ada potensi besar untuk menciptakan perubahan positif di Jawa Barat. Melalui pendekatan inklusif yang melibatkan semua elemen masyarakat, kader Fatayat NU terus bekerja untuk menciptakan lingkungan yang lebih toleran dan menghormati keberagaman agama di Indonesia.

Kesimpulan

Kader Fatayat NU Jawa Barat memiliki peran penting dalam menghadapi pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan. Melalui pendidikan, advokasi kebijakan publik, pemberdayaan perempuan, dan kolaborasi dengan berbagai organisasi, mereka berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang lebih inklusif dan toleran. Meskipun menghadapi berbagai tantangan, upaya yang dilakukan oleh kader Fatayat NU memberikan harapan akan terciptanya perdamaian dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya dalam hal kebebasan beragama dan berkeyakinan di Jawa Barat.

Orang Kristen Mengingatkan Saya akan Takdir

Penulis: Dhillia Nur'aeni Az-zuhri



Ada orang yang bilang, bergaul dengan yang beda agama bisa membuat iman kita goyah. Tapi, ketakutan seperti itu tidak selalu terbukti. Pengalaman saya malah menunjukkan cerita lain.

Cerita ini terjadi pada tahun 2018. Waktu itu, usia kandungan saya sudah menginjak bulan kelima. Suatu pagi saya kontrol kehamilan dan bersiap untuk cek USG di malam harinya. Namun saat USG, saya dibuat mematung karena pernyataan bidan dan dokter praktek: “janin yang Ibu kandung berhenti berkembang, sudah tidak bernyawa”.

Mendengarnya, saya percaya tidak percaya. Ujungnya jelas, kecewa juga sedih. Dunia rasanya runtuh. Semua harapan pupus seketika. Saya tidak bisa berbuat apa-apa lagi selain menangis sejadi-jadinya untuk meratapi peristiwa tersebut.

Bohong jika saya tidak sedih dan kecewa. Saya sempat mengumpat, “Tuhan tidak adil!”. Peristiwa itu terjadi saat Idul Fitri, di saat semua orang bersukacita dalam nuansa lebaran, saya harus masuk rumah sakit menjalani proses kuret untuk membersihkan keguguran janin.

Pasca kuret, saya dimasukan ke ruang rawat inap ibu nifas. Di sana terdapat beberapa ibu yang baru melahirkan disertai ranjang bayi di sampingnya. Melihat itu, dunia *kok* rasanya makin hancur. Seharusnya saya masuk ruangan bersama bayi saya. Tapi faktanya tidak, ranjang bayi ini kosong. Saat mendengar tangisan bayi dari sebelah, saya menutup mata, tak mau melihat ranjang bayi kosong di samping saya.

Ini merupakan masa-masa awal pernikahan kami. Saya tahu persis, suami dan keluarga besar juga mengalami guncangan kesedihan ini. Kami diuji dengan hal yang sangat berat untuk ditanggung.

“Selamat siang, Bu. Semoga Ibu segera pulih dan sehat kembali ya!” sapa seorang dokter Obygn saat memeriksa. Saya memaksakan diri tersenyum. Masih belum bisa menerima peristiwa buruk ini.

“Saya tahu kok Bu, beratnya seperti apa. Tentu Ibu sangat kecewa dan sedih. Tapi ini bisa jadi pesan dari Tuhan. Tuhan pasti memberikan makna dan pelajaran dari peristiwa ini. Mungkin ada yang terbaik disediakan untuk Ibu.” Nada bicaranya halus, membuat air mata saya terus mengalir.

“Tidak ada yang perlu dikecewakan, Bu. Ini dari Tuhan. Takdir Tuhan yang harus diterima oleh hamba-Nya. Jika Tuhan berkehendak untuk Ibu memiliki anak secepat itu, ya Tuhan akan takdirkan. Jika Tuhan masih belum berkehendak, Tuhan akan berikan nanti saat Ibu sudah siap” tutur nya lagi.

“Tugas kita hanyalah berusaha, berikhtiar dan berencana. Tetap yang menentukan hanyalah Tuhan. Agama kita mungkin beda Bu, tapi anjuran untuk mengimani takdir Tuhan sama. Hanya beda versi kata-kata saja, Bu.”

Mendengar itu, saya mengusap air mata dan duduk tegak. Saya mengangguk dan mulai tersenyum malu. Agama yang saya anut mewajibkan saya untuk mengimani *qodho* dan *qodar*, alias takdir Tuhan. Jujur, saya masih lalai. Padahal kuasa Tuhan yang selama ini saya alami, tentu lebih dari rasa sakit hari ini. Mengapa dokter itu begitu lekat dengan hal yang saya imani ini, sedangkan saya sendiri tidak?

Pulang dari rumah sakit, saya dibekali banyak pengalaman. Yang utama adalah urusan keimanan kepada Allah. Saya sadar saya begitu lemah, hingga berpaling dari nikmat yang telah Allah berikan selama ini. Perlahan saya mulai menerima kenyataan. Setiap manusia memiliki ceritanya masing-masing yang tentu sudah Allah buatkan skenarionya jauh-jauh hari di *lauhul mahfudz*.

Saya mulai kembali beraktivitas dan menjalankan kehidupan selanjutnya, dengan bekal keimanan yang telah ditampar oleh sang dokter. Hari-hari saya jalani dengan penuh semangat untuk menata kembali masa depan. Menyusun kembali mozaik-mozaik cerita indah kehidupan yang sempat tertunda. Meraih kembali cita dan asa yang terpendam.

Di awal kehamilan dulu, saya biasa memeriksakan diri ke seorang bidan. Bidan tersebut bernama Ravica. Beliau sudah sangat lama sekali membuka praktek menangani ibu hamil dan membantu persalinan. Banyak pasien yang percaya dan memeriksakan diri kepadanya. Setahu saya, Bidan Ravica memang beragama Kristen. Namun, tentu itu bukanlah masalah. Ia sangat handal dan profesional dalam bekerja.

Suatu hari, saya kembali periksa ke Bidan Ravica. Bertanya apakah rahim saya sudah siap untuk hamil kembali pasca keguguran. Jawaban bidan membuat saya sangat kaget, “Bukan hanya saya sudah siap untuk hamil, nyatanya dalam rahim ini sudah bersemayam janin”.

Saya masih tak percaya, meski bidan telah mendengarkan detak jantung janin melalui alat *ultrasound*. Suaranya semakin jelas dan semakin teratur.

“Bu Bidan, apa benar saya hamil lagi?”

“Iya, selamat ya, Bu!” Jawabnya sumringah.

Saya menunduk dan mulai merasakan adanya trauma dalam diri saya. “Saya nggak percaya, Bu Bidan. Saya takut...” ucap saya lemah.

“Ya Tuhan... Ibu tidak percaya? Baik ya, akan saya bawa ke ruangan USG dan perlihatkan janinnya.”

Bidan Ravica membawa saya ke Ruang USG dan benar apa yang ia katakan. Janin yang bersemayam dalam rahim saya sedang bergerak-gerak aktif. Bentuknya masih kecil.

“Benar kan, Bu? Tuhan hadirkan kembali malaikat kecil itu di rahim Ibu. Ini mukjizat Tuhan, Bu. Ibu harus percaya ini,” tuturnya lembut tapi tegas.

“Saya trauma, Bu... Saya takut...” Saya mengatakannya dengan situasi hati yang benar-benar gelisah.

“Ibu percaya Tuhan itu ada? Kalau Ibu percaya, Ibu harus mempercayai bahwa takdirnya pun ada,” katanya lagi.

“Jika Tuhan takdirkan ini untuk Ibu, maka selamanya akan menjadi milik Ibu. Jika Tuhan takdirkan bukan untuk Ibu, maka selamanya tidak akan

menjadi milik Ibu. Lagi pula anak adalah titipan Tuhan Bu. Kapan saja bisa Tuhan ambil. Ini Tuhan sudah berikan untuk Ibu....”

“Hidup tak selamanya pahit, Bu. Ada saatnya untuk bahagia. Hari ini Ibu berhak bahagia merayakan kebesaran dan keajaiban Tuhan memberikan detak jantung pada janin di rahim Ibu. Bersyukur, ya Bu?”

Saya tak dapat membendung air mata saya sambil memeluk erat Bidan Ravica, menangis sesenggukan. Tak tahu apa arti tangisan ini. Lagi-lagi, saya diingatkan orang lain yang berbeda agama tentang arti keyakinan dan keimanan.

Kini saya mengerti apa yang Allah berikan adalah ketentuan-Nya yang terbaik. Tak selamanya badai itu menerjang. Ada kalanya badai berlalu dan meninggalkan kita. Apa yang telah Allah takdirkan kepada kita adalah yang terbaik untuk kita. Ada makna dan *ibrah*, pelajaran di balik semua itu. Herannya, hal itu diajarkan kepada saya oleh dokter dan bidan yang bukan beragama Islam.

Pengalaman ini selalu menjadi refleksi untuk diri saya sendiri. Bagaimana kita bisa berinteraksi dengan tulus bersama rekan lintas agama. Bahkan mereka bisa menjadi penguat iman di saat kita lemah. Tidak perlu khawatir untuk goyah, ada banyak ketulusan disediakan Allah di sekitar kita.

Hidup Berdampingan Bersama Ahmadiyah Cabang Sukamaju-Garut

Penulis: Gia Riksa



Di tengah sikap intoleran terhadap Jemaat Muslim Ahmadiyah, masyarakat Sukamaju hadir sebagai Desa yang menjunjung tinggi nilai keberagaman. Di Desa Sukamaju, hidup berdampingan berbagai kelompok seperti Jemaat Muslim Ahmadiyah, NU, Muhammadiyah dan kelompok lainnya. Dalam kehidupan sehari-hari, kami mampu membentengi diri dari konflik dan menciptakan kehidupan yang damai dan harmonis.

Menjadi kelompok minoritas tidak menjadikan Ahmadiyah menjadi sasaran sikap intoleran di masyarakat. Jemaat Muslim Ahmadiyah Cabang Sukamaju menjadi salah satu cabang yang terbuka dan tetap aman di Kabupaten Garut. Hal tersebut tercipta berkat upaya pendekatan sosial kemasyarakatan yang dilakukan secara konsisten hingga hari ini, baik dengan pendekatan keorganisasian maupun secara personal. Hubungan baik yang senantiasa dibangun dengan tokoh masyarakat hingga aparat pemerintahan sangat membantu menciptakan lingkungan yang inklusif. Meskipun demikian, bukan berarti tidak ada pihak yang tidak suka terhadap Ahmadiyah, namun “Love for All Hatred for None” (Cinta untuk semua kebencian tidak untuk siapapun) menjadi prinsip dalam menyikapi hal tersebut.

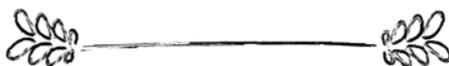
Berada di lingkungan pedesaan yang masih kental dengan budaya gotong royong menjadi modal besar untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Anggota Ahmadiyah selalu terdepan dan selalu ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan, seperti kerja bakti perbaikan jalan, pembangunan jembatan, mengangkut material bangunan, pengecoran rumah, hingga penanganan bencana alam. Bahkan tidak jarang, apabila ada kegiatan sosial kemasyarakatan yang pertama kali diajak untuk ikut serta adalah Ahmadiyah.

Tidak berhenti sampai sana, anggota Ahmadiyah Sukamaju juga selalu ambil bagian dalam kegiatan kemanusiaan. Terutama dalam gerakan donor darah, Ahmadiyah menjadi pendonor terbanyak di Desa Sukamaju. Sebelum Ramadhan 2024, anggota Ahmadiyah mengikuti donor darah dan sebanyak 36 kantong darah terkumpul dari 41 pendaftar.

Sikap saling terbuka antar kelompok menjadi faktor yang tidak kalah penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis. Namun, di tengah keharmonisan tersebut tersimpan rasa pilu karena masih ada saudara Ahmadiyah yang menjadi sasaran sikap intoleran dari masyarakat. Yang paling menyedihkan, hal tersebut terjadi di daerah otonomi yang sama. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Tentu menjadi tugas bersama untuk terus menanamkan sikap toleransi yang bukan hanya sekedar kata-kata, namun dilakukan melalui aksi nyata.

Menjaga Warisan: Penghargaan terhadap Budaya Lokal di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka

Penulis: Noer Syarifah DM



Budaya Lokal di Cigasong: Kekayaan yang Terus Hidup

Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, adalah wilayah yang kaya dengan tradisi dan budayanya. Budaya di wilayah ini terus diwariskan, ditafsirkan, dan dilaksanakan seiring dengan perubahan sosial di masyarakat. Nilai-nilai yang terus menerus dipraktikkan menjadi bukti legitimasi terhadap budaya masyarakat itu sendiri.

Clifford Geertz mengatakan bahwa kebudayaan adalah 'pola dari pengertian-pengertian atau makna yang terjalin dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, suatu sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik, yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan, dan mengembangkan pengetahuan serta sikap mereka terhadap kehidupan'. Pernyataan Geertz itu menunjukkan bahwa budaya merupakan hasil karya manusia yang membentuk sikap mereka melalui proses pembelajaran dan proses komunikasi; yang kemudian diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya.

Warisan Budaya di Kecamatan Cigasong

Masyarakat Cigasong adalah salah satu bukti dari bagaimana proses pembelajaran, komunikasi, dan pewarisan budaya itu terjadi. Hal tersebut bisa dilihat dari bagaimana masyarakat di kecamatan tersebut masih tetap melestarikan kebudayaan mereka yang kaya dan beragam. Budaya tradisional itu tampak sebagai suatu hal yang kokoh, bahkan meskipun terpaan budaya modern terus menerus merongrong masyarakat. Pelestarian yang dilakukan oleh mereka juga menjadi tanda bahwa tak hanya pelestarian tradisi, tapi identitas masyarakat setempat pun menjadi kokoh dan menjadi kebanggaan tersendiri. Beberapa warisan-warisan

budaya yang bisa kita lihat antara lain: kesenian tradisional, kerajinan tangan, produk unggulan lokal.

Pertama, Kesenian Tradisional. Kita bisa melihat ekspresi perawatan budaya itu dari beberapa kesenian tradisional yang ada di masyarakat tersebut, misanya terdapat Barongsai bilik dari Desa Karayunan, helaran sampyong, dan pencak silat dari Desa Baribis, Tenjolayar, Batujaya, dan Simpeureum masih sering dipentaskan di berbagai acara, baik lokal maupun regional. Tari Jaipong dengan gerakannya yang dinamis dan energik sering kali menjadi daya tarik utama dalam festival budaya. Wayang Golek, dengan cerita-cerita epik dan nilai-nilai moral yang disampaikan, tetap menjadi hiburan sekaligus media edukasi bagi masyarakat.

Gambar. 1
Helaran Sampyong Kecamatan Cigasong



Kedua, Kerajinan Tangan. Kerajinan tangan yang khas yang dibuat oleh masyarakat Cigasong adalah anyaman bambu. Tak hanya berkaitan dengan aspek estetis, kerajinan tangan ini juga telah membantu masyarakat lokal secara ekonomi.

Gambar. 2
Anyaman Bambu Desa Karayunan



Ketiga, Produk Unggulan Lokal Desa. Produk lain yang khas dan menjadi unggulan masyarakat Cigasong adalah lilin dari minyak jelantah (Lincah). Selain Lincah ada juga golok Simeut Pelem, yang merupakan hasil kreasi pandai besi dari kelurahan Simpereum.

Upaya Pelestarian Budaya Lokal

Mengapa tiga bentuk ekspresi budaya itu tetap bertahan sampai saat ini? Karena warisan-warisan tersebut terus dilestarikan oleh masyarakat Cigasong dengan beberapa cara. Tiga cara tersebut antara lain: pendidikan dan pelatihan, festival budaya, dan kolaborasi dengan pihak eksternal.

Pertama, Pendidikan dan Pelatihan. Sebagai bentuk upaya pelestarian warisan budaya, sekolah-sekolah yang ada di daerah Cigasong telah mengintegrasikan ajaran budaya lokal dengan kurikulum sekolah. Sehingga, setiap murid yang belajar di sekolah-sekolah tersebut dapat terdorong untuk mencintai warisan budaya. Selain itu, terdapat juga pelatihan kesenian dan kerajinan tangan yang diadakan secara rutin, sehingga masyarakat setempat memiliki kemampuan untuk terus mewariskan produk budaya mereka.

Kedua, Festival Budaya. Selain pendidikan dan pelatihan, masyarakat Cigasong juga sering menyelenggarakan festival budaya secara berkala, sebagai bentuk promosi dan perayaan kekayaan budaya yang mereka miliki. Festival ini tidak hanya menarik minat wisatawan, tapi juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi masyarakat lokal. Biasanya, festival ini diadakan bersamaan dengan perayaan hari besar nasional, seperti Hari Kemerdekaan RI, Sumpah Pemuda, Hari Kartini, dan hari-hari peringatan lainnya.

Ketiga, Kolaborasi dengan Pihak Eksternal. Strategi lain pewarisan budaya yang dilakukan oleh masyarakat lokal adalah dengan membangun kolaborasi dengan pihak eksternal seperti, pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan sektor swasta. Pihak-pihak tersebut berkontribusi dalam pemberian bantuan dana, pelatihan, dan promosi budaya lokal yang ada di kecamatan Cigasong. Dalam menjalin kolaborasi yang baik ini, Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka menjunjung slogan “Sareundeuk Sa-Igel” (yang artinya bersama-sama saling bahu-membahu) untuk mewujudkan Cigasong yang kompak.

Gambar. 3

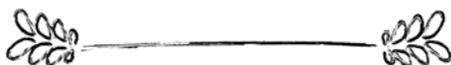


Sinergi Aktor-aktor P

Pewarisan budaya, sekaligus penghargaan terhadap nilai-nilai tradisional yang ada di masyarakat Cigasong merupakan langkah terbaik, dalam pemertahanan tradisi dan kesenian lokal yang ada di masyarakat tersebut. Laku-laku tersebut telah berhasil mempertahankan identitas, kohesi sosial, dan kesejahteraan komunitas. Upaya pelestarian ini tentu tidak hanya menjadi tanggung jawab masyarakat Cigasong itu sendiri, tapi juga turut mesti melibatkan pihak eksternal.

Perspektif Perempuan Penghayat Promblematika Stigma Terhadap Konsep Diri Perempuan

Penulis: Nanda Shelly Susanti



Stigma terhadap perempuan telah terjadi dalam kurun waktu yang sangat panjang. Membutuhkan waktu, tenaga, dan perjuangan yang tidak sedikit bagi perempuan untuk kemudian mendapatkan posisi yang setara dengan laki-laki.

Selama ini, stigma yang melekat pada perempuan menjadi penyebab munculnya diskriminasi terhadap perempuan. Begitu pun stigma yang melekat pada perempuan penghayat. Selain karena adanya stigma bahwa perempuan itu identik dengan pekerjaan domestik atau mengurus rumah tangga, kerap kali perempuan penghayat juga mendapat stigma tambahan atas dasar keyakinannya yang menganut ajaran Kepercayaan.

Stigma yang sering dilontarkan kepada perempuan penganut ajaran Kepercayaan diantaranya yaitu sesat, klenik, animisme, dinamisme, dan masih banyak lagi. Sehingga tak lepas dengan adanya fakta bahwa perempuan penghayat menjadi minoritas dalam konteks gender, perempuan penghayat pun juga menjadi minoritas dalam konteks keyakinan.

Bagaimana stigma sosial terhadap perempuan berpengaruh terhadap konsep diri menurut perempuan penghayat?

Stigma dan Dampaknya Terhadap Perempuan Penghayat

Setiap perempuan sudah sepatutnya mempunyai hak dan kedudukan yang sama dengan laki-laki, baik dalam berpikir, berpendapat, maupun bertindak. Hal tersebut sangat jelas menyangkut dengan konsep diri yang harus diyakini oleh seorang perempuan. Namun, kadangkala konsep tersebut justru tidak sesuai dengan yang terjadi dalam kondisi kehidupan yang sebenarnya. Seorang perempuan dan penghayat yang

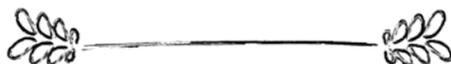
telah terstigma, justru mengalami kondisi *double burden* seperti yang telah disebutkan sebelumnya, di mana kondisi tersebut membatasi diri seorang perempuan penghayat.

Perempuan mempunyai hak untuk bermimpi, tapi belum tentu dia yakin bahwa dia bisa bermimpi. Perempuan mempunyai hak untuk berpendapat, tapi belum tentu ia berkenan untuk menyuarakan pendapatnya. Perempuan mempunyai hak untuk bertindak dan berperan sebagai pemimpin, tapi belum tentu dia berani mengambil kesempatan untuk menjadi seorang pemimpin. Belum lagi dengan adanya stigma yang berbasis keyakinan, yang pada akhirnya selalu menambah kekhawatiran dalam diri seorang perempuan penghayat.

Kekhawatiran yang dialami oleh perempuan penghayat menimbulkan ketakutan dan kemudian menimbulkan keengganan. Sehingga, akibat dari stigma terhadap perempuan dan penghayat, perempuan penghayat seringkali memilih untuk membatasi dirinya sendiri. Padahal, sejatinya perempuan penghayat dapat menyuarakan aspirasinya selaku bagian dari masyarakat, sama halnya dengan perempuan dari agama lain. Perempuan dapat mengembangkan dirinya menjadi lebih baik dan setara dengan laki-laki apabila dia telah memahami bahwa konsep diri yang ia yakini merupakan kunci dari sebuah perubahan. Konsep diri yang lebih positif itulah yang perlu ditanamkan dalam diri setiap perempuan, termasuk perempuan penghayat, agar perempuan dapat menumbuhkan rasa kepercayaan dirinya, bahwa menjadi perempuan bukan berarti selalu berada di posisi yang terbelakang.

Perundungan Sebagai bentuk Kegagalan Pendidikan Karakter di Sekolah

Penulis: Yeni Ernita Kusuma Wardani



Bagaimana dunia pendidikan merespon perundungan bagi siswanya di sekolah? Tentu saja, dunia pendidikan telah merespon perundungan di sekolah dengan berbagai strategi dan kebijakan yang bertujuan untuk mencegah, menangani, dan mengurangi insiden perundungan. Beberapa langkah yang diambil oleh sekolah, pemerintah, dan organisasi pendidikan untuk mengatasi masalah ini meliputi Pembuatan Kebijakan Anti-Perundungan, Penerapan Hukum dan Regulasi, Pelatihan dan Pengembangan Guru, Dukungan dan Intervensi, Pengawasan dan Pemantauan, serta Kolaborasi dengan Komunitas.

Sayangnya kasus-kasus perundungan di sekolah masih marak terjadi dan hal tersebut menjadi bukti bahwa implementasi pendidikan karakter masih jauh dari harapan. Pendidikan karakter, yang seharusnya menjadi pilar utama dalam sistem pendidikan Indonesia untuk membentuk siswa berakhlak mulia dan berintegritas, ternyata masih jauh dari standar etika yang baik dalam lingkungan pendidikan.

Melalui artikel ini, penulis akan menyoroti dan menyajikan salah satu kasus, khususnya di Jawa Barat, tentang masih adanya perundungan terhadap siswa minoritas.

Tahun 2015 telah menjadi pengalaman kelam bagi Govin. Ia merupakan siswa Hindu yang duduk di Sekolah Dasar Depok, Jawa Barat. Kala itu ia telah mengalami berbagai perundungan dari lingkungan sekolahnya. Hingga Govin menempuh Sekolah Menengah Pertama pun, perundungan masih saja dialami olehnya.

Govin mengalami berbagai tindakan perundungan yang sudah menjadi makanan sehari-hari. Ia didiskriminasi karena warna kulit, bentuk tubuh, dan agamanya. Govin bahkan pernah dipaksa untuk masuk ke

agama lain. Selain itu, ia juga mengalami kekerasan fisik pada wajah, bahu, perut, dan mata. Kakinya ditendang, dan dahinya pernah ditusuk pulpen. Teman-temannya bahkan sering mencemooh dan menghina Govin dengan julukan seperti perempuan.

Perundungan yang dialami Govin mungkin merupakan salah satu kasus yang muncul ke permukaan karena korban berani berbicara di depan publik. Meski begitu, Govin masih merasa tidak nyaman saat menceritakan pengalamannya. Ia juga mengalami masalah kepercayaan dengan teman baru, tidak mempercayai orang lain, dan merasa takut berada di keramaian.

Lalu, bagaimana sikap sekolah dan guru saat merespon pengalaman buruk tersebut? Belum ada respon sama sekali. Jumlah perundungnya terlalu banyak, bahkan hampir setiap kelas selalu ada perundung, dan para guru hanya merespon "saya tau apa yang kamu rasain sabar aja."

"Tapi sampai kapan saya harus sabar? Saya butuh keadilan, bukan hanya kata-kata. Saya sangat kecewa karena saya perlu bukti untuk melaporkan kejadian, namun saat perundungan terjadi, saya tidak sempat merekamnya. Tidak mungkin saya berpikir untuk merekam saat di-bully, saya sibuk membela diri. Saya capek," tutur Govin.

Contoh kasus Govin ini merupakan bukti nyata bahwa perundungan, baik secara fisik maupun verbal, menunjukkan bahwa pendidikan karakter masih belum terimplementasi secara nyata di dunia pendidikan. Saya menduga bahwa akar dari berbagai masalah yang terjadi disebabkan karena beberapa persoalan, dan persoalan-persoalan tersebut akan saya bahas di bawah ini.

Akar dari Perundungan

Sebab masalah yang pertama kali bisa dilacak adalah berasal dari guru, sebagai pendidik pendidikan karakter. Kurang lebih saya menduga terdapat dua masalah, yakni:

Pertama, Implementasi yang Tidak Konsisten. Jika guru tidak memahami pentingnya pendidikan karakter, konsistensi penerapannya di kelas tidak akan mewujudkan nyata. Hal ini bisa membuat pesan-pesan tentang nilai-nilai dan karakter mulia menjadi kabur atau bahkan bertentangan satu sama lain dalam penjelasan dan penerapannya kepada murid.

Kedua, Keteladanan yang Kurang Efektif. Guru yang tidak menyadari pentingnya pendidikan karakter tidak akan bisa menjadi teladan yang baik bagi siswa. Keteladanan adalah salah satu cara efektif untuk membangun dan membentuk karakter murid. Tanpa kesadaran ini, siswa akan kehilangan kesempatan untuk belajar atau meniru dari contoh yang nyata.

Ketiga, Minimnya Pendekatan Holistik dalam Pendidikan Karakter. Masalah lain dalam permasalahan perundungan juga berkaitan dengan belum holistiknya pendidikan karakter. Pendidikan karakter yang tak holistik akan membuat pendidik hanya fokus pada pembelajaran nilai moral secara kognitif tanpa mempertimbangkan juga aspek emosional dan sosial siswa, yang juga sangat penting untuk diperhatikan.

Para anak didik mungkin punya pemahaman konseptual, tapi mereka bisa jadi kebingungan atau tidak memiliki keterampilan dalam mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari. Pendidikan karakter yang tak holistik juga mungkin akan gagal mengembangkan kemampuan sosial yang tak kalah penting, seperti empati, komunikasi efektif, dan kerjasama. Selain itu, anak didik juga bisa jadi akan tidak mampu saat menghadapi konflik. Mereka jadi kurang mampu mengatasi konflik atau berhadapan dengan situasi yang menuntut mereka untuk merespon secara etis.

Belum lagi masalah emosional atau mental yang bisa jadi terabaikan. Kesehatan dan kesejahteraan mental siswa padahal sangat penting, dan merupakan bagian dari pendidikan karakter. Pentingnya dimensi mental ini bisa dilihat dari bagaimana aspek tersebut bisa sangat berpengaruh terhadap motivasi, prestasi akademik, dan kesejahteraan mereka secara personal.

Pendidikan karakter yang tak holistik (yang hanya berfokus pada dimensi kognitif) itu mungkin akan membangun kesan bahwa pendidikan karakter yang selama ini dipelajari terasa tak relevan dan tidak berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Sehingga penerapannya pun akan tak terasa atau sulit.

Keempat, Lemahnya Pengawasan dan Penerapan Aturan Hukum dan Regulasi. Pengawasan dan penegakan aturan yang tidak efektif akan menyebabkan perundungan tetap ada atau mungkin semakin menjadi-jadi,

hal tersebut terjadi karena para perundung akan merasa bahwa tindakan yang mereka lakukan tidak memiliki konsekuensi apa pun. Sebaliknya, siswa yang merasakan perundungan pun akan selalu merasa tidak aman, karena tidak adanya pengawasan dan penerapan hukum yang tegas terhadap masalah perundungan.

Korban perundungan bisa mengalami efek buruk dalam aspek emosional dan akademis, yang mana hal tersebut dapat mengganggu kesejahteraan siswa. Dampak jangka panjangnya adalah, saat perundungan tidak dicegah, diproses, dan ditangani secara serius maka tingkat kepercayaan terhadap sekolah pun akan menurun.

Solusi Terhadap Perundungan

Berdasarkan sebab-sebab itulah maka diperlukan sebuah solusi konkrit untuk mengatasi masalah perundungan. Pada bagian ini saya akan menyuguhkan beberapa solusi yang mungkin bisa diterapkan sebagai upaya solutif untuk masalah perundungan.

Pertama, Kebijakan dan Regulasi yang Kuat. Tak hanya dalam level institusi pendidikan pemerintah pun memiliki peran dalam mengatasi masalah perundungan. Pemerintah harus mengembangkan kebijakan nasional yang tegas dan jelas mengenai pencegahan dan penanganan perundungan di sekolah. Kebijakan tersebut kemudian wajib diterapkan di setiap sekolah secara konsisten, berikut juga dukungan dari tiap dinas pendidikan setempat. Regulasi mengenai perundungan pun harus memuat konsekuensi yang jelas dan tegas bagi pelaku perundungan berikut langkah-langkah rehabilitas baik bagi korban dan pelaku; sehingga setiap pihak dapat memperoleh perlindungan dan bantuan yang tepat.

Kedua, Pelatihan dan Pengembangan Guru. Guru dan staf mesti diberikan pelatihan yang intensif agar mereka dapat mencegah dan menangani perundungan. Pelatihan ini juga melibatkan pelatihan keterampilan sosial dan emosional, keterampilan komunikasi, dan teknik mediasi konflik. Pelatihan ini akan lebih siap dalam menciptakan lingkungan yang sehat, aman, dan mendukung para siswa di sekolah.

Ketiga, Budaya Sekolah yang Mendukung. Sekolah harus bisa menciptakan lingkungan yang inklusif dan ramah bagi siapa pun. Pendekatan restoratif bisa digunakan dalam penanganan perundungan,

dengan fokus pada pemulihan hubungan dan rehabilitasi, dan bukan hukuman terhadap siswa. Pendidikan karakter juga harus diintegrasikan dengan kurikulum, agar nilai-nilai positif seperti empati, tanggung jawab, hormat, dan kejujuran dapat diajarkan kepada para siswa. Sekolah yang suportif akan menciptakan suasana dan karakter siswa yang selalu saling mengorhati dan mendukung satu sama lain.

Keempat, Peran Aktif Siswa. Tak hanya guru, para siswa pun harus ikut terlibat dalam penanganan dan pencegahan perundungan. Artinya setiap siswa wajib dibekali pengetahuan dan diajarkan untuk mempraktikkan nilai-nilai moral yang positif, berikut cara menangani perundungan. Mereka harus diajarkan tentang keterampilan sosial dan emosional, dan membangun mental saling membantu, agar mereka mampu menangani konflik secara konstruktif dan hubungan yang sehat.

Kelima, Keterlibatan Orang Tua dan Komunitas. Pihak lain yang harus terlibat adalah orang tua dan komunitas. Orang tua dan komunitas harus terlibat aktif dalam proses penanganan dan pencegahan perundungan di sekolah. Sekolah, dengan demikian, harus bekerja sama dengan orang tua, berikut juga organisasi non-profit, lembaga layanan sosial, dan komunitas lokal untuk mendukung program anti-perundungan. Lingkungan kerjasama ini akan melahirkan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi siswa.

Keenam, Sistem Pelaporan yang Aman dan Efektif. Sekolah harus menyediakan sistem pelaporan yang bersifat anonim, sehingga apabila ada korban mereka dapat terlindungi secara aman. Tindak lanjut terhadap masalah perundungan pun harus bisa bekerja dengan efektif, agar penanganan terhadap masalahnya dapat berjalan dengan lancar. Selain itu pihak sekolah juga bisa menyediakan layanan konseling psikologis, baik bagi korban atau pun pelaku (sebagai upaya rehabilitasi).

Ketujuh, Evaluasi dan Pemantauan Berkala. Terakhir adalah evaluasi dan pemantauan yang berkala, agar pencegahan terhadap perundungan bisa terus dilakukan. Evaluasi ini, yang bisa dilakukan melalui survey, diberlakukan kepada siswa, guru, dan orang tua agar bisa menilai atau mengukur tingkat perundungan dan efektivitas program anti-perundungan. Evaluasi itu kemudian harus menjadi sebuah laporan yang bersifat transparan, sehingga langkah-langkah yang diambil pun bisa jelas.

Tak hanya itu laporan tersebut pun mesti dipublikasikan secara berkala. Evaluasi ini dengan demikian harus dilakukan secara terus menerus, agar menciptakan lingkungan sekolah atau pendidikan yang sehat.

Anak di luar nikah? Pengalaman Kekerasan Berbasis Gender Perempuan Minoritas

Penulis: Latifah Setia R



24 tahun saya menikah, saya tidak punya surat nikah teh. Anak saya juga akte kelahirannya hanya mencantumkan nama saya saja sebagai ibunya. Sehingga saat di SMP oleh teman-temannya dia pernah diejek sebagai anak di luar nikah. (Ibu S, 45 tahun penganut Baha'i)

Kalimat ini muncul dari percakapan penulis dengan Ibu S pemeluk agama Baha'i. Dia merupakan keturunan ke tiga yang menganut Baha'i yang tinggal di Kota Bandung. Pernikahan dirinya dan suaminya pada tahun 2000 sah menurut agama yang dipeluknya. Namun dia tidak bisa mendapatkan surat nikah dari Negara.

Pemeluk agama Baha'i merupakan salah satu kelompok minoritas yang sering kali menghadapi diskriminasi dan kekerasan di berbagai negara, termasuk di Indonesia. Baha'i, sebagai agama yang relatif kecil dan tidak diakui secara resmi oleh negara, menghadapi tantangan dalam menjalankan keyakinannya. Salah satu kelompok yang paling rentan terhadap kekerasan berbasis agama adalah perempuan pemeluk Baha'i. Kekerasan yang mereka alami sering kali diperparah oleh faktor gender, sehingga menciptakan bentuk kekerasan yang lebih kompleks dan mendalam.

Kekerasan Berbasis Gender dan Agama

Perempuan pemeluk Baha'i tidak hanya mengalami diskriminasi karena keyakinan mereka yang berbeda dari mayoritas, tetapi juga karena status gender mereka. Kekerasan berbasis gender agama yang dialami perempuan Baha'i bisa muncul dalam berbagai bentuk, seperti diskriminasi dalam akses pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, serta pelecehan verbal dan fisik. Mereka kerap menjadi sasaran kekerasan karena dianggap

melanggar norma-norma agama mayoritas yang lebih dominan di masyarakat.

Di Indonesia, di mana agama Baha'i tidak secara resmi diakui, perempuan Baha'i sering kali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hak-hak sipil dasar. Misalnya, mereka mungkin mengalami hambatan dalam mengurus dokumen kependudukan seperti KTP atau akta kelahiran, karena kolom agama dalam dokumen tersebut tidak mencantumkan agama Baha'i. Tanpa akses ke dokumen resmi ini, perempuan Baha'i menjadi lebih rentan terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Stigma dan Pengucilan Sosial

Selain kekerasan berbasis institusi, perempuan Baha'i juga menghadapi stigma sosial yang kuat. Mereka sering kali dianggap sebagai "penyimpang" oleh masyarakat yang mayoritas menganut agama lain. Hal ini menyebabkan perempuan Baha'i sering kali terisolasi, baik secara sosial maupun ekonomi. Dalam beberapa kasus, mereka dihadapkan pada tekanan untuk meninggalkan agama mereka, dan jika menolak, mereka bisa mengalami pengucilan, tidak hanya dari lingkungan sosial mereka, tetapi juga dari keluarga sendiri.

Pengalaman ini sering kali memperberat beban yang harus ditanggung perempuan Baha'i, terutama karena mereka juga harus mengelola peran tradisional gender dalam rumah tangga. Perempuan yang merupakan kepala keluarga atau pencari nafkah utama mungkin menghadapi lebih banyak tekanan untuk mengonversi agama mereka demi memperoleh stabilitas ekonomi dan sosial bagi diri mereka dan keluarga.

Perjuangan dan Ketahanan

Meskipun menghadapi berbagai bentuk kekerasan, perempuan pemeluk Baha'i terus memperjuangkan hak-hak mereka dan mempertahankan keyakinan mereka. Mereka sering kali berjuang untuk mendapatkan pengakuan atas hak-hak dasar mereka sebagai warga negara, sambil terus menjalankan peran penting dalam komunitas mereka. Ibu S senantiasa mendorong anak perempuannya untuk hadir dalam kegiatan terkait Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan salah satunya yang diadakan oleh PW Fatayat NU Jawa Barat. Selain dirinya juga turut serta dalam gerakan advokasi untuk kebebasan beragama dan hak asasi

manusia, bekerja sama dengan organisasi hak asasi di tingkat Jawa Barat. “Semoga tidak ada lagi Perempuan Baha’i yang mengalami nasib seperti keluarga saya ke depan” pungkasnya.

Program Pendidikan Gratis Meningkatkan Tingkat Pendidikan dan Toleransi

Penulis: Sulthan Faiz Akbar



Kabupaten Bandung Barat, 21 Maret 2024. Di tengah polemik kasus keberagaman agama di masyarakat Indonesia, Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD) Lembang lebih memilih untuk berdampak positif bagi masyarakat sekitar. PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa adalah pusat kegiatan belajar masyarakat nirlaba dan non-profit yang didirikan oleh GKKD Lembang pada tahun 2010 dan sampai saat ini masih aktif memberikan program pendidikan bagi masyarakat yang belum mendapatkan pendidikan jenjang SD/SMP/SMA.

Pendirian pusat kegiatan belajar masyarakat ini diawali dari data tingkat pendidikan masyarakat di Kabupaten Bandung Barat yang diterbitkan oleh BPS pada tahun 2010. Data menunjukkan bahwa masyarakat umur 10-19 tahun masih banyak yang tidak melanjutkan sekolah sampai jenjang SMA, dan beberapa penyebabnya adalah putus sekolah. Kesadaran akan hal tersebut menjadikan para jemaat dan pendeta GKKD Lembang berinisiatif untuk mendirikan PKBM Cahaya Bangsa Kahuripan sebagai pusat kegiatan belajar untuk masyarakat yang putus sekolah untuk mendapatkan pendidikan di jenjang SD/SMP/SMA.

PKBM Cahaya Bangsa Kahuripan memiliki visi untuk mewujudkan lembaga pendidikan non-formal yang unggul di Indonesia dengan menyelenggarakan pembelajaran terbuka dan jarak jauh pada tahun 2025. Untuk mencapai visi tersebut, PKBM CKB menyelenggarakan pendidikan kesetaraan Paket A yang setara dengan SD, Paket B yang setara dengan SMP, dan Paket C yang setara dengan SMA. Selain itu, terdapat juga kursus-kursus keterampilan seperti Kursus Komputer, Kursus Bahasa Inggris dan Kursus Musik, Bela Diri, dan juga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

PKBM CKB memiliki penilaian akreditasi B dari BAN PAUD dan PNF. Seiring dengan perkembangan zaman, pada tahun 2018 pembelajaran secara daring (online) dilaksanakan menggunakan “Google Suite for Education” (sekarang bernama “Google Workspace for Education”) untuk memfasilitasi proses belajar-mengajar secara daring. Penyelenggaraan program tersebut menunjukkan bahwa PKBM CKB telah memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar dan masyarakat secara luas. Hal tersebut terbukti dari kesan dan pesan yang disampaikan oleh para alumni, masyarakat luas yang berkecimpung di dunia pendidikan, dan tokoh masyarakat Sunda.

“PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa, Warga Belajar tambah Cerdas walau Pendidikan gratis... Manfaatkan kesempatan ini, dengan mengikuti Program kami, Paket A, B dan C serta Kursus Komputer dan Bahasa Inggris. PKBM CKB Mantaps...” ujar Koswara Eko yang merupakan alumni PKBM CKB. Ia menyatakan bahwa program-program yang diselenggarakan PKBM CKB dapat menjadikan warga lebih cerdas.

Dian Nuraeni yang merupakan pendidik dan pengusaha melihat bahwa PKBM CKB ini merupakan lembaga pendidikan yang berasaskan sila ke-5 untuk memberikan keadilan sosial di bidang pendidikan. Ia mengatakan, “PKBM Cahaya Kahuripan Bangsa adalah lembaga pendidikan non-formal yang menyelenggarakan beberapa program yaitu kesetaraan paket A, B dan C, PAUD, Kursus bahasa Inggris dan kursus komputer, yang berasaskan pancasila sila ke-5 atau kebhinekaan. Khususnya program tersebut diselenggarakan untuk merangkul mereka yg putus sekolah di wilayah Bandung Barat dan sekitarnya.”

Imas Siti Aminah yang merupakan tokoh budaya Sunda juga menyatakan “Wajib belajar adalah 12 tahun akan tetapi banyak yang belum lulus SMA, bahkan masih banyak yang belum lulus SD dan SMP. Cahaya Kahuripan Bangsa adalah salah satu jalan keluar untuk mencapai pendidikan itu. Selain dari gurunya yang berkompeten, fasilitasnya juga memadai”. Beliau menyoroti bahwa gurunya memiliki kompetensi dalam pembelajaran, dan fasilitas di PKBM CKB pun cukup memadai untuk kegiatan pembelajaran di sana.

Program pendidikan gratis ini tidak saja memberikan dampak positif bagi pendidikan masyarakat di sekitar, tetapi juga memberikan dampak

positif bagi GKKD Lembang itu sendiri. Sejak GKKD Lembang pindah ke Ruko Central Lembang yang terletak di Jalan Maribaya No. 1, Kec. Lembang, kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh GKKD Lembang tidak pernah diganggu oleh masyarakat sekitar, karena melalui dampak pendidikan yang diberikan oleh pihak gereja, masyarakat sekitar semakin sadar akan pentingnya toleransi melalui pendidikan yang didapatkan. Di sisi lain, masyarakat sekitar melihat bahwa ada dampak positif yang diberikan oleh gereja ini, sehingga mereka melihat dampak positif yang diberikan dengan mengesampingkan perbedaan agama dan rasa toleransi pun tumbuh di masyarakat sekitar GKKD Lembang.

Cilolohan dalam Harmoni: Kebersamaan di tengah Keberagaman

Penulis: Tia Pramesti



Baru kali ini saya mendengar suara yang lebih lantang dari biasanya. Suara yang datang dari sudut-sudut yang sering kali diabaikan, dari mereka yang selama ini berada di pinggir: kelompok minoritas agama yang terpinggirkan. Dalam setiap kalimat yang mereka ucapkan terbersit keberanian dan keteguhan, seolah mereka sudah menunggu momen ini sepanjang hidup mereka. Mereka berbicara bukan hanya untuk didengar, tetapi juga untuk diakui keberadaannya, untuk dihormati hak-haknya, untuk meraih keadilan yang selama ini mereka impikan.

Ini adalah kali keempat saya mengikuti rangkaian kegiatan inklusi kebebasan beragama dan berkeyakinan yang diinisiasi oleh PW Fatayat NU Jawa Barat di Tasikmalaya, dan saya selalu mendapatkan pengalaman yang luar biasa dan penuh makna. Di kali keempat ini, saya menemukan suasana yang penuh kehangatan dan keterbukaan. Saya merasakan bahwa kami sudah benar-benar menjadi saudara yang bisa saling menaruh kepercayaan dan berbagi pengalaman sulit satu sama lain. Kami berdialog seakan sedang menyembuhkan luka lama akibat cerita kelam kampung halaman kami di masa lalu.

Hari ini bukanlah hari kemarin. Tasikmalaya yang dulu berbeda dengan Tasikmalaya sekarang. Kota ini telah meninggalkan cerita kelam dan pertikaian mengerikan di masa lalu. Meskipun prasangka dan tindakan jahat terhadap kelompok yang dianggap berbeda masih ada, seperti beberapa jemaat Ahmadiyah yang pernah mengalami pencurian harta akibat keyakinan keliru bahwa harta dan darah mereka halal untuk diambil, kondisi di Tasikmalaya kini tidak separah dulu. Hari ini, tidak ada gereja yang dibakar, tidak ada kaca masjid yang dipecahkan akibat lemparan batu.

Desa Cilolohan adalah satu dari beberapa desa yang menjadi bukti bahwa Tasikmalaya sedang berbenah untuk memperbaiki hubungan antar

kelompok. Saya mengenal masyarakat desa Cilolohan melalui kegiatan yang diadakan oleh PW Fatayat NU Jawa Barat yaitu Workshop Keberagaman Dan Toleransi Dalam Perspektif Gender. Saya sebagai anggota PC Fatayat NU Kabupaten Tasikmalaya berkesempatan menjadi bagian dari kepanitiaan kegiatan ini. Di desa ini terdapat sebuah kisah kerukunan yang patut dijadikan contoh.

Masyarakat di desa ini mayoritas beragama Islam, namun memiliki pemahaman dan afiliasi yang berbeda-beda. Mereka tergabung dalam berbagai organisasi massa (ormas) seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, Persatuan Islam (Persis), Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia (IJABI), dan Wahidiyah. Meskipun demikian, keberagaman pemahaman ini tidak menjadi penghalang bagi mereka untuk hidup berdampingan secara harmonis.

Kehidupan Sehari-hari dalam Keberagaman

Masyarakat Cilolohan menjalani kehidupan dengan saling menghormati dan mendukung satu sama lain. Hal ini terlihat jelas dalam kebiasaan mereka untuk saling mengunjungi pengajian yang diadakan oleh masing-masing ormas. Tidak hanya itu, mereka juga sering terlibat dalam kegiatan sosial bersama, seperti gotong royong, peringatan hari besar Islam, dan acara-acara desa lainnya.

Kunci dari kerukunan ini adalah kesadaran mereka akan pentingnya persatuan. Meskipun berbeda pemahaman, mereka menyadari bahwa pada dasarnya mereka adalah saudara dari satu keturunan yang sama, yaitu Kerajaan Sukapura. Riwat kerajaan ini menjadi tali pengikat yang kuat, menciptakan rasa kebersamaan, dan persatuan di antara mereka selama bertahun-tahun.

Begitulah cerita menentramkan yang baru pertama kali saya dengar dari kelompok minoritas agama. Kelompok yang biasanya terpinggirkan, namun di Cilolohan, Kabupaten Tasikmalaya, mereka menemukan kehidupan yang berbeda. Sepanjang kegiatan, mereka tampak berdialog dalam harmoni. Saling sahut menyahut dengan antusias saat menceritakan bagaimana indahnya pengalaman mereka yang selalu berdampingan dan bekerjasama dalam menopang kehidupan bersama.

Di Balik Kuatnya Persatuan, Tantangan Selalu Ada Untuk Menguji

Kadang kala, tak semua berjalan mulus tanpa tantangan. Tantangan memang tidak berasal dari dalam masyarakat mereka, melainkan muncul dari pihak luar. Salah satu tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Cilolohan adalah adanya fatwa sesat yang dikeluarkan oleh pemerintah terhadap kelompok Wahidiyah. Fatwa ini, menimbulkan keresahan dan potensi perpecahan di masyarakat. Namun, berkat kearifan lokal dan pendekatan dialogis yang diterapkan oleh tokoh-tokoh masyarakat, permasalahan ini dapat dikelola dengan baik sehingga tidak menimbulkan konflik yang lebih besar.

Tokoh masyarakat dan pemimpin ormas di Cilolohan selalu berusaha menjembatani perbedaan dan mencari jalan tengah yang dapat diterima oleh semua pihak. Mereka mengutamakan dialog dan musyawarah dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang muncul. Dengan pendekatan ini, ketegangan dapat diredam dan kerukunan tetap terjaga.

Dialog adalah kunci. Dialog kebebasan beragama dan berkeyakinan tidak bisa diibaratkan dengan peribahasa “memantik api dalam sekam”. Saling berbagi cerita, ide, dan pandangan terkait perbedaan tidak berarti kita memantik konflik. Sebaliknya, membuat kita saling mengenal, memahami, dan mempertimbangkan posisi satu sama lain guna memastikan setiap orang bisa hidup aman dan nyaman.

Harmoni yang Patut Dicontoh

Kerukunan masyarakat Cilolohan merupakan contoh nyata bahwa keragaman pemahaman dalam satu agama tidak harus berujung pada konflik. Dengan kesadaran akan pentingnya persatuan dan pendekatan yang inklusif, perbedaan justru dapat menjadi kekayaan yang memperkaya kehidupan sosial.

Kisah ini mengajarkan bahwa toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan adalah kunci utama dalam membangun masyarakat yang harmonis. Masyarakat Cilolohan telah membuktikan bahwa dengan semangat persaudaraan dan kearifan lokal, perbedaan pemahaman dapat diatasi dan kehidupan yang damai dapat terwujud.

Kerukunan masyarakat Cilolohan, Kabupaten Tasikmalaya, menjadi inspirasi bagi kita semua dalam menjaga persatuan di tengah

keberagaman. Semoga kisah ini dapat memotivasi masyarakat di daerah lain untuk selalu mengutamakan dialog dan toleransi dalam menghadapi perbedaan, sehingga tercipta kehidupan yang damai dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamilah, Eva Syarifatul. 2024. *Aktualisasi Perempuan Ahmadi dalam Menghadapi Diskriminasi*
- Aeni, Desy Salma. 2024. *Keragaman Agama dalam Bingkai Media*
- Azizah, Amatilah. 2024. *6 Tips Mendidik Anak agar Toleran dengan yang Berbeda Agama*
- Muslimah, Fauziah. 2024. *Kegiatan Lintas Iman sebagai Potret Toleransi dalam Keberagaman Indonesia di Masa Depan*
- Nurwahidah, Rahma. 2024. *Mengapa Perempuan menjadi korban kekerasan dalam Pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan?*
- Ningrum, Handika Praba. 2024. *Menyuarakan Keadilan untuk Perempuan: Refleksi dari Dunia Pendidikan*
- Sabila, Dinda. 2024. *Mengenal Lebih Dekat Apa Itu Disabilitas (HWDI Jabar)*
- Ilyas, Andi M. 2024. *Perseteraan, Rekonsiliasi dan Kejenaakaan Moderasi*
- Wulany. 2024. *Bentuk Kekerasan Berbasis Gender dalam Konteks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*
- Napilah, Paridah. 2024. *Perjalanan Dalam Menyuarakan Perdamaian di Tingkat SLTA Se-Bandung Raya*
- Salma, Parwiin. 2024. *In-Person Training "Modul Jurnalistik Inklusif untuk Kesetaraan dan Kebangsaan"*
- Putri, Rosa Adinda. 2024. *Suara Bumi dalam Keberagaman*
- Sulastri, Ai. 2024. *Perjalanan Seorang Aktivis Perempuan Syiah dalam Melawan Diskriminasi*
- Sopi. 2024. *Bagaimana Resolusi Konflik Berperspektif Gender dalam Kasus Ahmadiyah di Tasikmalaya?*
- Masruroh, Iis. 2024. *Shalat Tarawih Dua Imam: "Ngemong" Perbedaan ala Masjid Agung Surakarta*

- Irmawandi, Yohanes. 2024. *Jalan Lain Mendirikan Rumah Ibadah*
- Farhan Mubarak. 2024. *Peran Kader Fatayat NU Jawa Barat dalam Mencegah Pelanggaran Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan*
- Az-zuhri, Dhillia Nur'aeni. 2024. *Orang Kristen Mengingatkan Saya akan Takdir*
- Riksa, Gia. 2024. *Hidup Berdampingan Bersama Ahmadiyah Cabang Sukamaju-Garut*
- DM, Noer Syarifah. 2024. *Menjaga Warisan: Penghargaan terhadap Budaya Lokal di Kecamatan Cigasong Kabupaten Majalengka*
- Susanti, Nanda Shelly. 2024. *Perspektif Perempuan Penghayat Promblematika Stigma Terhadap Konsep Diri Perempuan*
- Wardani, Yeni Ernita Kusuma. 2024. *Perundungan Sebagai bentuk Kegagalan Pendidikan Karakter di Sekolah*
- R, Latifah Setia. 2024. *Anak di luar nikah? Pengalaman Kekerasan Berbasis Gender Perempuan Minoritas*
- Akbar, Sulthan Faiz. 2024. *Program Pendidikan Gratis Meningkatkan Tingkat Pendidikan dan Toleransi*
- Pramesti, Tia. 2024. *Cilolohan Dalam Harmoni: Kebersamaan Di Tengah Keberagaman*

